



**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2006-2012**

*Analysis Development Gaps Among District In The Bondowoso Regency
In The Period Of 2006-2012*

TESIS

Oleh :

**Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP
NIM 090820201019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2006-2012**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2) dan memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi

Oleh :

**Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP
NIM 090820201019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, serta atas seluruh perjuangan, kerja keras, pengorbanan serta penantian atas sebuah kesabaran menghadapi tantangan yang ada, tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Wahyuni dan Ayahanda K. Santoso tercinta yang telah mencurahkan segenap doa dan kasih sayang yang tiada terhingga, semangat dan dukungan untuk menggapai cita serta seluruh pengorbanan yang tucurahkan selama ini.
2. Keluargaku tersayang Nurul Rahmawati, Dinda Deviachita Arumdhani, Lintang Cahyani Andira, Dhamar Alamsyah.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,”

(terjemahan Q.S Ash-Sharfi :6-7)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP

NIM : 090820201019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2016

Yang menyatakan,

Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP

090820201019

TESIS

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2006-2012**

Oleh :

**Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP
NIM 090820201019**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Dr. Moehammad. Fathorrazi, M.Si
Dosen Pembimbing II : Dr. Zainuri, M.Si

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012

Nama Mahasiswa : Sigit Dwiwahju Banendro, S. TP

NIM : 090820201019

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Tanggal Persetujuan : 19 Juli 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moehammad. Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

PENGESAHAN

Judul Tesis

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2006-2012

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Sigit Dwiwahju Banendro, S. TP

NIM : 090820201019

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji tanggal : 19 Juli 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo, S., M.Si (.....)
NIP. 19581024 198803 1 001
2. Anggota : Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si (.....)
NIP. 19710610 200112 2 002
3. Anggota : Dr. Mohammad Adenan, M.M (.....)
NIP. 19661031 199203 1 001
4. Pembimbing I : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si (.....)
NIP. 19630614 199002 1 001
5. Pembimbing II : Dr. Zainuri, M.Si (.....)
NIP. 19640325 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten
Bondowoso Tahun 2006-2012*

Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso pada periode tahun 2006-2012 dengan variabel dependen ketimpangan pendapatan dan dua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan analisis *Fixed Effect Model*. Dalam mendeskripsikan ketimpangan antar wilayah menggunakan beberapa pendekatan yaitu Indeks Williamson dan Indeks Bonet serta tipologi Klassen. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan pendapatan relatif, yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1% akan meningkatkan indeks ketimpangan pendapatan antar kecamatan sebesar 1,5% dan terdapat hubungan negatif antara variabel IPM dengan indeks ketimpangan pendapatan relatif, yaitu setiap kenaikan rata-rata IPM sebesar 1% akan menurunkan indeks ketimpangan pendapatan antar kecamatan sebesar 11,76%.

Kata Kunci : *Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Indeks Williamson, Indeks Bonet*

*Analysis Development Gaps Among District In The Bondowoso Regency
In The Period of 2006-2012*

Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP

*Master of Economic Sciences, Faculty of Economics and Business
University of Jember*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that influence the development gaps among districts in the Bondowoso regency in the period of 2006-2012 with the dependent variable of income inequality and two independent variables of economic growth and the Human Development Index (HDI). The data used in this research is the analysis of panel data with Fixed Effect Model approach. In describing disparities among districts several approaches with utilized Williamson index, Bonet Index and Klassen typology. The results of the analysis of this study indicated that economic growth and human development index influence on the index of income inequality among districts in the regency. There was a positive relationship between the variables of economic growth and an index of relative income inequality, which any increase in economic growth on average by 1% will increase the index of income inequality among districts of 1.5% and there was a negative relationship between the variables of human development index and the index of income inequality relative, that every increase in the average Human Development Index by 1% would reduce income inequality among district Index of 11.76%.

Key Word : *Income inequality, Economics growth, HDI, Fixed Effect Model, Williamson Index, Bonet Index*

RINGKASAN

Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012; Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP, 090820201019; 2016 : 160 Halaman; Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil. Serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004:97). Permasalahan yang kemudian lahir adalah dampak adanya perbedaan hasil pembangunan baik secara ekonomi maupun non ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan dalam unsur kegiatan ekonomi, baik dari sisi potensi daerah, kualitas pemerintah dalam menata kelola ekonomi daerah, keterlibatan stakeholder dalam aktifitas ekonomi, dan adanya perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta latar belakang daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso pada periode tahun 2006-2012 dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan analisis *Fixed Effect Model*. Dalam mendeskripsikan ketimpangan antar wilayah kecamatan menggunakan beberapa pendekatan yaitu Indeks Williamson dan Indeks Bonet serta tipologi Klassen. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap indeks ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Terdapat hubungan positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan pendapatan relatif, yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1% akan meningkatkan indeks ketimpangan pendapatan antar kecamatan sebesar 1,5% dan terdapat hubungan negatif antara variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan indeks ketimpangan pendapatan relatif, yaitu setiap kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1% akan menurunkan indeks ketimpangan pendapatan antar kecamatan sebesar 11,76%.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Zainuri, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang banyak membantu, membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis ini dengan baik dan benar.
3. Ibu Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah banyak memberikan kesempatan dan kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Rafael Purতোমো S., M.Si. selaku Dosen Wali selama menjadi mahasiswa pasca sarjana Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M selaku anggota tim penguji dalam Tugas Akhir ini.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan dan kebahagiaan yang lebih. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 19 Juli 2016

Sigit Dwiwahju Banendro, S.TP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8

	Halaman
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional	12
2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	15
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah	16
2.1.5 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	19
2.1.5.1 Indeks Williamson	20
2.1.5.2 Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB Perkapita Relatif	21
2.1.6 Teori Basis Ekonomi	22
2.1.6.1 Analisis Shift Share	23
2.1.6.2 Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Wilayah	25
2.1.7 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah	28
2.1.7.1 Hipotesis Kuznets	28
2,1,7.2 Tipologi Daerah	30
2.1.8 Pembangunan Manusia	33
2.1.9 Hubungan Antara Pembangunan Manusia Dengan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah ..	35
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	38
2.3 Kerangka Konseptual	41
BAB 3. METODE PENELITIAN	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43

	Halaman
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Variabel Penelitian	44
3.5 Definisi Operasional Variabel	44
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi	44
3.5.2 Ketimpangan Pembangunan Wilayah	45
3.5.3 Indeks Pembangunan Manusia	45
3.6 Metode Analisis Data	46
3.6.1 Analisis Kesenjangan Wilayah	47
3.6.1.1 Analisis Ketimpangan Pendapatan Wilayah Relatif	47
3.6.1.2 Indeks Williamson	47
3.6.1.3 Tipologi Klassen	48
3.6.1.4 Analisis Shift Share	50
3.6.2 Korelasi Pearson (Pembuktian Hipotesis Kuznets)	51
3.6.3 Model Regresi	52
3.6.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	54
3.6.4.1 Uji Multikolinearitas	54
3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas	54
3.6.4.3 Uji Normalitas	55
3.6.4.4 Uji Autokorelasi	55
3.6.5 Pengujian Statistik	56
3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
3.6.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T)	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso	58
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bondowoso	58

	Halaman
4.1.2 Kondisi Geografis dan Administratif	59
4.1.3 Kondisi Demografi	61
4.1.4 Kondisi Perekonomian	63
4.1.4.1 Struktur Ekonomi	63
4.1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi	66
4.1.4.3 Kemiskinan	71
4.1.4.4 Ketenagakerjaan	74
4.1.5 Pembangunan Manusia	75
4.2 Hasil Penelitian	78
4.2.1 Analisis Kesenjangan Wilayah	78
4.2.1.1 Indeks Williamson	78
4.2.1.2 Ketimpangan Pendapatan Relatif	79
4.2.1.3 Tipologi Klassen	80
4.2.1.4 Korelasi Pearson (Pembuktian Hipotesis Kuznets)	83
4.2.2 Hasil Estimasi Metode Regresi Data Panel	84
4.2.3. Pengujian Statistik	85
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
4.2.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)	86
4.2.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	86
4.2.4.1 Uji Multikolinearitas	86
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas	87
4.2.4.3 Uji Normalitas	87
4.2.4.4 Uji Autokorelasi.....	88
4.2.5 Analisis Pertumbuhan Wilayah.....	89
4.3 Pembahasan	95

	Halaman
4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan	
Pendapatan	95
4.3.2 IPM dan Ketimpangan Pendapatan	100
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 (%)	3
1.2 Tabel Distribusi PDRB DHK 2000 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 (%).....	5
2.1 Tabel Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	38
3.1 Tabel Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/ Daerah.....	49
3.2 Tabel Uji Statistik Durbin-Watson	56
4.1 Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso	61
4.2 Tabel Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2006-2012.....	62
4.3 Tabel Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 ADHK Tahun 2000 (%).....	64
4.4 Tabel PDRB dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 ADHK Tahun 2000 (Rupiah).....	65
4.5 Tabel Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 ADHK Tahun 2000 (%).....	66
4.6 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bondowoso ADHK 2000 Menurut Kecamatan Tahun 2007-2012 (%).....	70
4.7 Tabel Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2009-2012.....	72
4.8 Tabel Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2009-2012.....	73
4.9 Tabel Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2006-2012.....	75
4.10 Tabel Perkembangan Indikator Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016-2012.....	76
4.11 Tabel Perkembangan IPM di Kabupaten Bondowoso per Kecamatan Tahun 2016-2012.....	77
4.12 Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso periode 2006 – 2012	78

	Halaman
4.13 Indeks Kesenjangan Per Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012	79
4.14 Tabel Klasifikasi Tipologi Klassen di Kabupaten Bondowoso Tahun 2008	82
4.15 Tabel Klasifikasi Tipologi Klassen di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012	82
4.16 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012	84
4.17 Tabel Hasil Estimasi Regresi	84
4.18 Tabel Analisis Uji Multikolinearitas	87
4.19 Tabel Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012	90
4.20 Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso Terhadap Provinsi Jawa timur Tahun 2006-2012 (Juta Rp) 2006-2012 (Milyar Rp)	90
4.21 Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso Terhadap Provinsi Jawa timur Tahun 2006-2012 (dalam %)	92
4.22 Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor-Sektor Ekonomi Kecamatan terhadap Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 (Juta Rp) ...	93
4.23 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Kerjanya Tahun 2012 (Jiwa)	98
4.24 Persentase Dan Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012	103
4.25 Persebaran Sekolah Berdasarkan Tingkat dan Jenis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 (Unit)	104
4.26 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Gambar Kontribusi Tiap Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 (%).....	4
2.1 Gambar 3.1 Kurva Kuznets U – Terbalik	30
2.2 Gambar Kerangka Konseptual.....	42
3.1 Gambar Aturan Membandingkan Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson	56
4.1 Gambar Peta Orientasi Kabupaten Bondowoso.....	60
4.2 Gambar Peta Wilayah Kabupaten Bondowoso.....	61
4.3 Gambar Hasil Uji Normalitas	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2013..... 118
Lampiran B	PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2011 (Milyar) 119
Lampiran C	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kecamatan Kabupaten Bondowoso ADHK Tahun 2000 Periode Tahun 2006-2012 (Dalam Juta Rupiah) 120
Lampiran D	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kecamatan ADHK Tahun 2000 Periode Tahun 2006-2012 (Dalam Juta Rupiah) 121
Lampiran E	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2006-2012 (Jiwa) 122
Lampiran F	Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Bondowoso ADHK Tahun 2000 Periode Tahun 2006-2012 (Rupiah) 123
Lampiran G	Kontribusi Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso ADHK Tahun 2000 Periode Tahun 2006-2012 (%) 124
Lampiran H	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 ... 125
Lampiran I	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 ... 126
Lampiran J	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 ... 127
Lampiran K	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 ... 128
Lampiran L	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 ... 129
Lampiran M	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 ... 130
Lampiran N	Indeks Williamson Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 ... 131

	Halaman
Lampiran O Indeks Williamson Per Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso	132
Lampiran P Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012	133
Lampiran Q Analisis Tipologi Klassen	134
Lampiran R Indeks Ketimpangan Pendapatan Relatif Bonet	135
Lampiran S Analisis Shift-Share Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Bondowoso Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012 (Juta Rp) 2006-2012 (Milyar Rp)	136
Lampiran T Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor-Sektor Ekonomi Per Kecamatan Terhadap Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 (Juta)	137

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004:97).

Permasalahan yang kemudian lahir adalah dampak adanya perbedaan hasil pembangunan baik secara ekonomi maupun non ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan dalam unsur kegiatan ekonomi, baik dari sisi potensi daerah, kualitas pemerintah dalam menata kelola ekonomi daerah, maupun keterlibatan stakeholder dalam aktifitas ekonomi, dan juga adanya perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan latar belakang daerah.

Dari sisi potensi daerah, keuntungan kompetitif daerah berupa berlimpahnya potensi sumber daya alam maupun non sumber daya alam terkadng berbeda satu sama lain. Daerah yang berlimpah sumber daya alam akan relatif lebih diuntungkan karena memiliki kesempatan untuk lebih memanfaatkan potensi tersebut sejauh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi keterlibatan *stake holder*, tingkat keterlibatan masyarakat daerah, pengusaha domestik, dan investor tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi iklim yang kondusif bagi investasi tentu lebih mengundang investor untuk mengembangkan sektor ekonomi yang paling menguntungkan di suatu wilayah.

Sementara dari sisi sumber daya manusia baik ditinjau dari segi pendidikan maupun kesehatan tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Kualitas SDM masyarakat yang baik tentu akan menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan, dan sebaliknya jika kualitas SDM rendah akan menjadi beban pemerintah dan menghambat pembangunan.

Dari sisi kemampuan pemerintah kabupaten dalam menata kelola ekonomi daerah, pemerintah yang dapat menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif tentu akan lebih mampu membangun perekonomian daerahnya daripada pemerintah daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan pemerintah pusat dan cara-cara lama membangun ekonomi. Bagi daerah yang tidak dapat menciptakan kondisi tersebut, kesempatan daerah untuk membangun perekonomian tentu akan terhambat dibanding daerah yang secara progresif membangun ketiga unsur tersebut. Perbedaan kondisi inilah yang melahirkan perbedaan kondisi ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Ketimpangan atau disparitas merupakan dampak yang tidak terelakkan dari pembangunan. Perbedaan yang dimiliki masing-masing daerah menjadikan setiap daerah memiliki cara dan kebijakannya sendiri dalam memajukan perekonomian daerahnya. Sehingga ketimpangan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut. Permasalahannya bukan perbedaan yang ada antar daerah tersebut, melainkan adanya kecenderungan melebarnya perbedaan (ketimpangan) yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pembangunan.

Terkait dengan disparitas ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, banyak ahli yang menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk memperlihatkan kondisi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. PDRB merupakan data statistik dari perolehan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah. Suatu wilayah dikatakan makmur apabila nilai PDRB perkapita semakin tinggi. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu wilayah, maka pertumbuhan ekonominya dianggap semakin tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta diikuti oleh distribusi

pendapatan yang merata kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini yang selanjutnya menciptakan kesenjangan ekonomi. Dengan kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketidakmerataan hasil pertumbuhan ekonomi suatu wilayah kepada masyarakat wilayah tersebut.

Provinsi Jawa Timur yang merupakan pusat perekonomian Kawasan Timur Indonesia memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian nasional yaitu sebesar 15,15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia tahun 2012. Pada tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur nampak fluktuatif, ketika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso cenderung menurun, pada tahun 2006 hingga 2007 di Provinsi Jawa Timur justru naik mencapai 6,11 % kemudian menurun pada tahun 2009 mencapai 5,01 % sedangkan pada tahun 2012 Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan hingga mencapai 7,27 %. Dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi daripada Kabupaten Bondowoso. Di satu sisi terdapat kelompok Kabupaten/Kota dengan PDRB di atas rata-rata PDRB Provinsi dan sebaliknya terdapat Kabupaten/Kota dengan PDRB di bawah rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bondowoso. Hal ini menunjukkan terjadinya distribusi PDRB yang kurang merata di antara 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012 (% y on y)

Tahun	Jawa Timur		Bondowoso	
	PDRB	Pertumbuhan	PDRB	Pertumbuhan
2006	271.249.316,69	5,80	2.552.931,43	5,58
2007	287.814.183,91	6,11	2.693.563,47	5,51
2008	305.538.686,62	6,16	2.836.726,04	5,31
2009	320.861.168,91	5,01	2.978.906,80	5,01
2010	342.280.764,89	6,68	3.146.982,26	5,64
2011	366.983.277,46	7,22	3.341.964,11	6,20
2012	393.666.437,37	7,27	3.557.683,76	6,45
	Rata-rata	6,32	Rata-rata	5,67

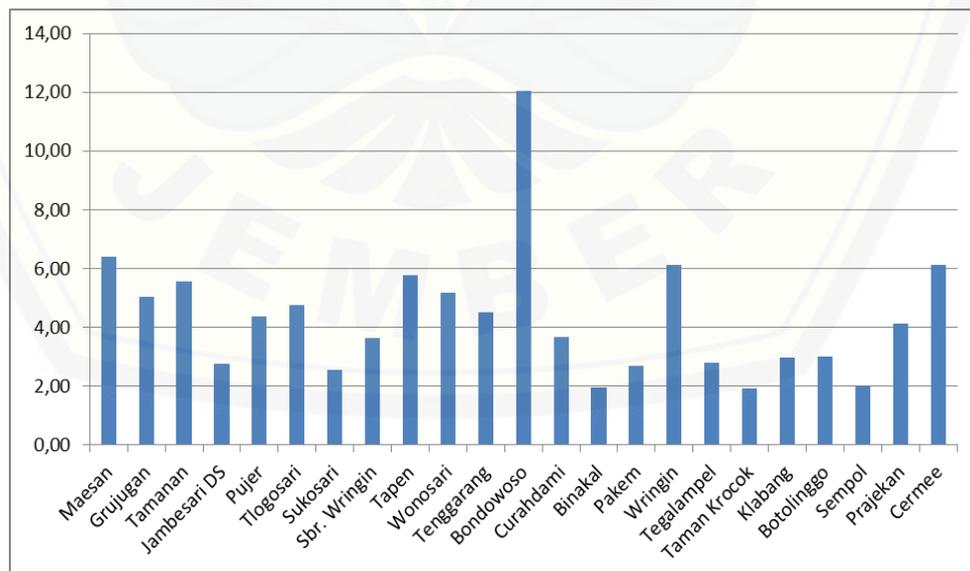
Sumber: 1. BPS, PDRB Provinsi Jawa Timur (2007-2013)

2. BPS, PDRB Kabupaten Bondowoso (2007-2013)

Dari Tabel 1.1 (hal 3) dapat dijelaskan bahwa, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso selama tujuh tahun (2006–2012) mengalami fluktuasi, terjadi kecenderungan yang terus turun pada tahun 2006 hingga tahun 2009 dan kemudian meningkat hingga tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 mencapai 5,58 % menurun hingga tahun 2009 menjadi 5,01 %, namun demikian selanjutnya meningkat dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,45 % atas dasar harga konstan tahun 2000.

Pada tahun 2012 perekonomian Kabupaten Bondowoso didukung oleh empat Kecamatan yang memberikan kontribusi sebesar lebih dari 6% yaitu Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Maesan, Kecamatan Wringin dan Kecamatan Cermee, delapan Kecamatan menyumbang 4 – 6%, sedangkan sebelas kecamatan lainnya menyumbang dibawah 4%. Sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso terbesar adalah Kecamatan Bondowoso yaitu sebesar 12,06% sedangkan terkecil yaitu Kecamatan Taman Krocok sebesar 1,91%. Kontribusi setiap kecamatan terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Kontribusi Tiap Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 (%)



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bondowoso (2013)

Kecamatan Bondowoso sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat perekonomian dan pertumbuhan dengan jumlah penduduk Kecamatan Bondowoso dalam BPS pada tahun 2012 tercatat sebesar 71.479 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.337 jiwa/km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 19.804. Sedangkan Kecamatan Sempol memiliki jumlah penduduk terkecil sebanyak 11.487 jiwa dengan kepadatan penduduk terkecil 53 jiwa/km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 3.458 jiwa. Hal tersebut tentu juga mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro di Kabupaten Bondowoso.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto secara konstan menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Distribusi PDRB ADHK 2000 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 (%)

No.	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maesan	44,25	0,36	15,87	0,59	1,08	27,06	0,65	1,91	8,23
2	Grujugan	38,84	0,58	29,44	0,60	0,98	18,75	0,65	1,98	8,18
3	Tamanan	61,69	0,75	11,60	0,50	0,90	16,43	0,39	2,02	5,71
4	Jambesari DS	34,05	1,66	21,79	1,08	1,65	32,27	0,39	0,85	6,27
5	Pujer	44,24	1,22	15,54	0,77	1,34	23,01	0,70	1,78	11,39
6	Tlogosari	45,75	0,89	15,73	0,93	1,35	23,96	0,61	1,49	9,28
7	Sukosari	65,02	0,66	10,01	0,84	0,87	15,75	0,33	0,44	6,09
8	Sbr. Wringin	50,42	1,44	15,74	0,76	1,27	23,18	0,50	1,45	5,24
9	Tapen	51,73	0,34	12,79	0,52	1,05	22,31	0,59	2,00	8,68
10	Wonosari	44,37	0,46	14,99	0,67	1,36	26,83	0,80	2,95	7,57
11	Tenggarang	34,71	0,58	16,69	0,91	1,66	30,45	1,97	2,65	10,38
12	Bondowoso	6,17	0,17	15,17	0,54	1,58	46,52	8,02	9,26	12,56
13	Curahdami	49,64	0,55	18,52	0,73	1,68	22,16	0,91	0,82	4,98
14	Binakal	46,11	1,02	26,55	0,84	1,55	19,39	0,50	0,31	3,74
15	Pakem	51,31	0,69	21,77	0,74	1,50	19,98	0,24	0,45	3,30
16	Wringin	55,87	0,70	16,74	0,72	0,99	16,68	0,70	1,10	6,50
17	Tegalampel	47,75	0,68	14,31	0,82	1,92	22,99	1,23	2,19	8,11
18	Taman Krocok	52,74	0,91	13,97	0,90	1,31	21,89	0,72	0,93	6,63
19	Klabang	52,85	2,86	10,16	0,63	1,02	18,60	0,76	2,76	10,36
20	Botolinggo	55,96	0,61	15,59	0,25	1,30	23,84	0,43	0,50	1,53
21	Sempol	70,91	0,52	9,07	0,73	0,53	16,37	0,37	0,44	1,06
22	Prajejan	43,30	1,20	26,83	0,70	0,98	15,73	0,55	1,21	9,49
23	Cermee	56,18	0,41	12,35	0,61	1,07	18,73	0,29	1,45	8,91

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bondowoso (2013)

Keterangan :

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Sebagaimana pada Tabel 1.2 (hal 5) hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sangat dominan bergantung pada sektor pertanian, kecuali Kecamatan Bondowoso yang merupakan kecamatan kota. Perekonomian di Kecamatan Bondowoso dominan bergantung kepada sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan serta sektor jasa-jasa. Kecamatan Sempol adalah kecamatan yang paling tinggi ketergantungannya pada sektor pertanian. Kecamatan yang paling berkembang di sektor industri pengolahan adalah Kecamatan Grugujan. Sektor jasa-jasa hanya 4 kecamatan yang berkembang yaitu Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Pujer dan Kecamatan Klabang.

Konsep desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia telah memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengelola ekonomi daerah melalui desentralisasi ekonomi dan fiskal. Desentralisasi ekonomi ditandai melalui penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pembangunan ekonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pengelola ekonomi daerah dan masyarakat setempat sebagai aktor ekonomi (Arsyad, 2004:298). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kegiatan pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari tiga unsur utama yaitu (Arsyad, 2004:298):

1. Unsur potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan.
2. Pemerintah daerah sebagai penanggungjawab sekaligus pelaksana kegiatan ekonomi daerah.

3. Unsur swasta sebagai mitra pemerintah atau sebagai stake holder kegiatan ekonomi daerah.

Ketiganya akan menentukan arah dan proses pembangunan ekonomi pada daerahnya masing-masing.

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997). Jika kondisi ini dibiarkan, tingkat kesenjangan akan semakin lebar karena tingkat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan saling terkait. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat PDRB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial, bila PDRB per kapita meningkat maka daya beli masyarakat akan naik, kesempatan kerja dan perekonomian akan semakin membaik sehingga gizi, kesehatan, pendidikan dan kebebasan memilih pekerjaan untuk mencapai masa depan kondisinya meningkat (Rahardja dan Manurung, 2008:129).

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan/program prioritas maupun kegiatan alokasi APBD kabupaten di setiap wilayah kecamatan hendaknya dilakukan secara tepat sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Sebaliknya apabila alokasi APBD kabupaten yang dilaksanakan di wilayah kecamatan yang kurang tepat, dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi hasil pembangunan dan kesenjangan antar wilayah makin lebar.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 23 wilayah kecamatan diduga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan yang disebabkan oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki masing-masing wilayah kecamatan tersebut. Penelitian ini melihat ketimpangan secara ekonomi melalui pendapatan (dilihat dari PDRB) juga hubungannya dengan sisi sosialnya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM terdapat beberapa hal yang menjadi

indikator pembangunan manusia yaitu dari segi kesehatan dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dari segi pendidikan dengan menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) serta Indeks Daya Beli (IDB).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus kepada:

1. Bagaimana gambaran ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana karakteristik pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan masalah penelitian yaitu :

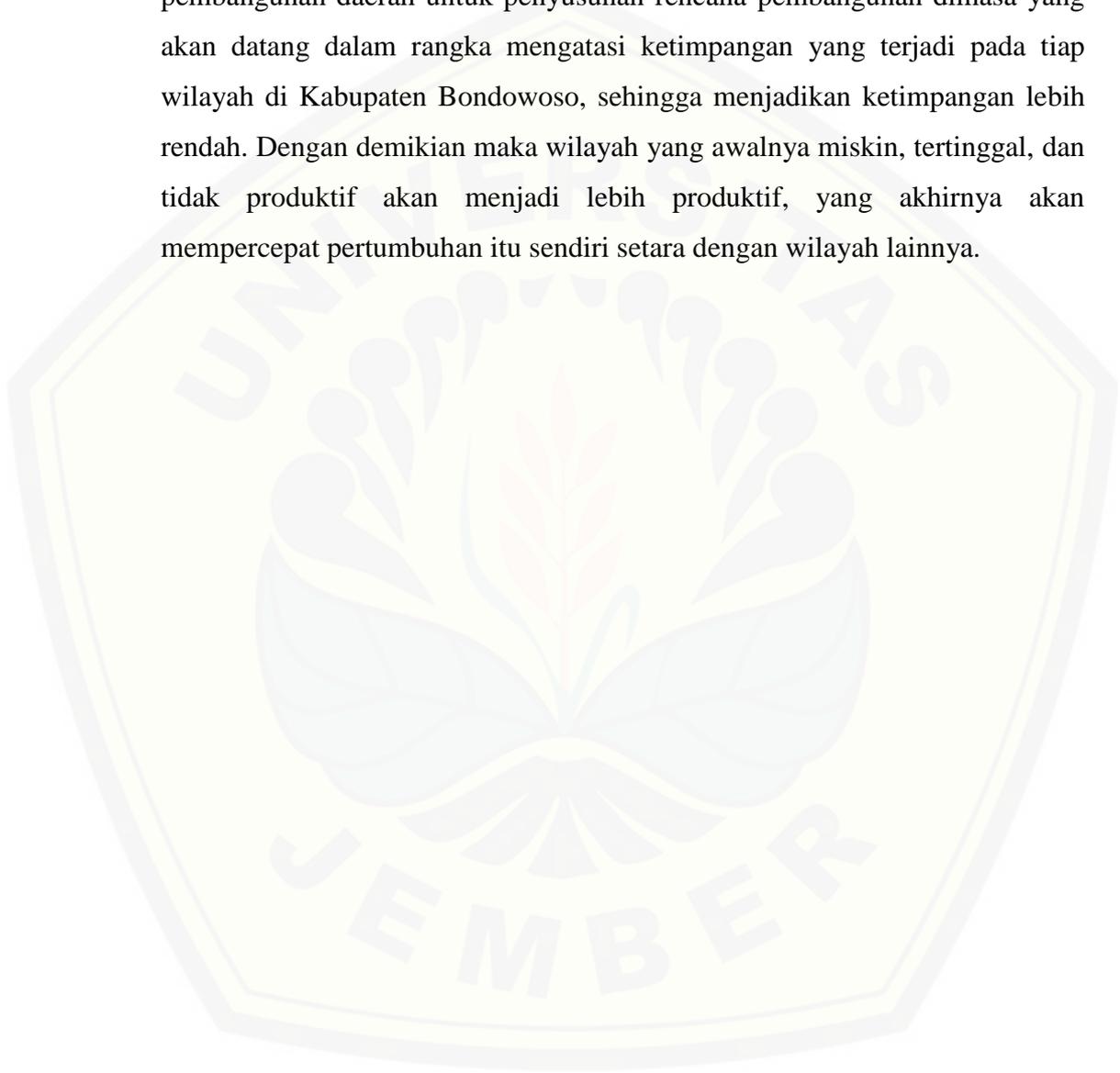
1. Untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antar wilayah di kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis karakteristik pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Bondowoso.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 sudut pandang yang menentukan pentingnya penelitian ini, yaitu :

1. Secara akademik : memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran pada Ilmu Ekonomi Pembangunan khususnya tentang bagaimana ketimpangan antar wilayah kecamatan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

2. Secara praktis : memberikan sumbangan pemikiran dan pengalaman bagi lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bondowoso tentang ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan rencana pembangunan dimasa yang akan datang dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi pada tiap wilayah di Kabupaten Bondowoso, sehingga menjadikan ketimpangan lebih rendah. Dengan demikian maka wilayah yang awalnya miskin, tertinggal, dan tidak produktif akan menjadi lebih produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri setara dengan wilayah lainnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses atau usaha suatu masyarakat atau kelompok untuk mengelola sumberdaya yang ada dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sukirno, 2006:423). Menurut Meier (1995:7) dalam Kuncoro (2006:17) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Karena merupakan suatu proses, pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan.

Menurut Jhingan, (2000:67), proses pembangunan ekonomi mempunyai 4 faktor yang menjadi modal pembangunan, diantaranya yaitu : sumberdaya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan motivasi), sumberdaya alam (tanah, mineral, bahan bakar dan iklim), pembentukan modal (mesin-mesin dan jalan raya), dan tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen dan kewiraswastaan).

Menurut Rostow (dalam Kuncoro, 1997:45), proses pembangunan ekonomi memiliki 5 tahap, yaitu (1) Tahap Perekonomian Tradisional; (2) Tahap Prakondisi tinggal landas; (3) Tahap Tinggal Landas; (4) Tahap Menuju Kedewasaan; (5) Tahap Konsumsi Tinggi.

Tahap 1, Perekonomian Tradisional. Pada tahap ini perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih sangat terbatas. Dengan kata lain, dalam kondisi perekonomian seperti ini sektor pertanian memegang peranan yang cukup penting.

Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah saja.

Tahap 2, Prakondisi Tinggal Landas. Kondisi tahap ini pada dasarnya merupakan transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang disamping sektor pertanian yang masih memegang peranan yang cukup signifikan bagi perekonomian. Pada tahap ini, perekonomian mulai bergerak dinamis, industri-industri bermunculan, perkembangan teknologi yang pesat, dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, serta terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur.

Tahap 3, Tinggal Landas. Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan dalam keseluruhan pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini memiliki waktu yang cukup pendek. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi.

Tahap 4, Menuju Kedewasaan. Tahap ini dicirikan dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumberdaya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Pada saat Negara mengalami tahapan ini, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi. *Pertama*, tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. *Kedua*, perubahan watak pengusaha dari pekerja keras kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. *Ketiga*, masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

Tahap 5, Konsumsi Masa Tinggi. Tahap ini adalah tahap yang menentukan keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini berlaku pada masa yang relatif pendek, kira-kira dua dasawarsa. Tahap konsumsi masa tinggi merupakan akhir dari tahapan pembangunan. Pada fase ini terjadi perubahan (demand side) dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu terjadi pola pergeseran

ekonomi yang semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi kini beralih ke konsumsi.

Menurut Arsyad (2004:298) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi untuk mengarahkan hal-hal pengambilan inisiatif daerah dalam proses pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada, selain itu juga pembangunan institusi baru dan industri alternatif, identifikasi pasar, alih teknologi, produksi yang lebih baik, dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah atau wilayah dalam menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar wilayah atau daerah, maupun peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah/daerah sehingga ketimpangan dan kesenjangan di dalam masyarakat tidak terjadi dan kesejahteraan dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana aktifitas/kegiatan ekonomi mampu memberikan tambahan perolehan pendapatan masyarakat suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam skala kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar kesejahteraan masyarakat dapat

tercapai. Pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan fungsi distribusi yang melahirkan pemerataan. Namun sayangnya dalam berbagai realita yang ada, pertumbuhan dan pemerataan tidak selalu berjalan beriringan. Walaupun ada beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun sebagian besar khususnya di Indonesia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi jaminan bahwa akan terjadi pemerataan.

Faktor-faktor dalam teori pertumbuhan ekonomi nasional dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni : modal, lapangan kerja dan kemajuan teknologi. Sedangkan penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional yaitu keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lain seringkali mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui secara rinci berdasarkan sifat-sifatnya.

Terkait dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terdapat empat jenis model pertumbuhan ekonomi regional yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional. Berikut ini adalah model-model pertumbuhan ekonomi regional yang dimaksud (Sjafrizal, 2008:87).

1. Model Basis Ekspor

Model ini mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila suatu daerah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka

pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2008:87)

2. Model *Interregional Income*

Model ini merupakan model yang didapat dari perluasan model basis ekspor dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah. Model ini dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai *exogenous variable*, pada model *interregional* ini, ekspor dimasukkan ke dalam sistem, yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah.

3. Model Neo-Klasik

Model ini dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Non-Klasik. Menurut model ini, kemampuan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Di satu sisi, kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah itu saja, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan monolitas antar daerah (Sjafrizal, 2008:95).

4. Model Penyebab Berkumulatif

Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Nikolas Kaldor. Model ini merupakan hasil dari kritik terhadap Model Neo-Klasik. Model ini tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya. Sebaliknya, model ini mempercayai bahwa pemerataan pembangunan hanya akan dapat dicapai melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan proses pembangunan.

Pada dasarnya suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk melakukan proses pencatatan jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini terjadi bukan saja karena jenis barang dan jasa yang sangat beragam namun juga

karena satuan ukurannya pun beragam. Karena itu angka yang digunakan dalam menaksir perubahan output adalah nilai moneterinya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan sebab PDB harga konstan telah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Oleh karena itu, sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan yang berarti ada perubahan produksi selama periode pengamatan (Rahardja dan Manurung, 2008:129).

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan atau dapat disebut juga dengan disparitas merupakan dampak yang tidak terelakkan dari pembangunan. Perbedaan yang dimiliki masing-masing daerah menjadikan setiap daerah memiliki cara dan kebijakan sendiri dalam memajukan perekonomian daerahnya, sehingga ketimpangan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:135) pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata, tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan.

Distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan terbaginya daerah-daerah, yakni daerah yang maju secara ekonomi dan yang tertinggal. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) hal ini menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung

meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah (Arsyad, 2004:129).

Hirschman dalam Arsyad (1999:289) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi secara geografis tidak seimbang, kondisinya tidak merata ke semua daerah. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di beberapa daerah sedangkan pada daerah lainnya cenderung tertinggal. Dalam proses pertumbuhan selanjutnya, perbedaan ini akan semakin lebar karena berbagai faktor yang mempersulit daerah untuk berkembang, sehingga diperlukan campur tangan/intervensi pemerintah dalam pelaksanaannya. Apabila suatu daerah/wilayah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu haruslah membawa pengaruh positif terhadap daerah lain.

Pembangunan regional yang didasarkan pada desentralisasi tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga menimbulkan dampak lain yakni adanya kesenjangan atau disparitas antar daerah. Kesenjangan regional diartikan sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier dan sektor sosial di suatu wilayah. Secara umum, ketimpangan pendapatan terlihat dari perbedaan alokasi pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi, kondisi geografis dan kebijakan pemerintah (Sjafrizal, 2012:112).

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah pada umumnya terjadi karena perbedaan *endowment factor* yang dimiliki masing-masing daerah, yakni faktor demografi dan faktor-faktor kekayaan yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah. Selain itu masih banyak faktor-faktor lain dari penyebab ketimpangan antar wilayah.

Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antara lain yaitu (Sjafrizal, 2008:118):

1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya

alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan stuktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar.

Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak

dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah.

Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

2.1.5 Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:245) pengukuran disparitas yang didasarkan pada kriteria Bank Dunia merupakan indikator yang paling umum digunakan. Untuk mengukur disparitas, Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kategori, yaitu :

- a. 20% penduduk berpendapatan tinggi
- b. 40% penduduk berpendapatan sedang
- c. 40% penduduk berpendapatan rendah

Berdasarkan pembagian penduduk di atas, Bank Dunia melakukan kriteria dengan menilai distribusi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Kriteria dalam disparitas pendapatan antara lain :

1. Tinggi, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% dari bagian pendapatan,
2. Sedang, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima 12% hingga 16% bagian pendapatan, dan

3. Rendah, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima lebih dari 16% bagian pendapatan.

Sejumlah cara yang umum digunakan dalam setiap studi tentang ketimpangan yaitu dengan alat ukur ketimpangan (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:89):

1. *Lorenz Curve*, mengukur ketimpangan berdasarkan bentuk kurva distribusi pendapatan dengan bentuk dua dimensi sumbu, sumbu horizontal menunjukkan kumulatif persentase dari populasi yang mempunyai pendapatan, sedangkan sumbu vertical menunjukkan kumulatif persentase dari jumlah pendapatan.
2. *Gini Ratio*, mengukur ketimpangan berdasarkan luas *Kurva Lorenz* yang dibagi dengan daerah ketimpangan sempurna.
3. *Generalized Entropi Measure (GEM)* atau *Theil Index*.
4. *L Index*, merupakan pengembangan dari *Theil Index*.
5. *Williamson Index*, merupakan alat ukur ketimpangan yang menggunakan *Coefficient of Variation (CV)*.

2.1.5.1. Indeks Williamson

Index Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya Tahun 1966 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional atau metode untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah. Indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) dikenal dengan Indeks Williamson (Sjafrizal, 1997) dengan rumus sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

- Y_i = PDRB per kapita di Kecamatan i .
 Y = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Bondowoso
 f_i = jumlah penduduk di Kecamatan i
 n = jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso

Besarnya I_w adalah $0 < I_w < 1$

$I_w = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata

$I_w = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna)

$I_w \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata

$I_w \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

- Bila $I_w < 0,3$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah

- Bila $I_w = 0,3 - 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah sedang

- Bila $I_w > 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Menurut Sutarno (2003) Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten di satu provinsi tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB per kapita rata-rata daerah lain.

2.1.5.2. Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB Perkapita Relatif

Ketimpangan wilayah merupakan ketidakmerataan pendapatan yang diterima antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Terdapat ukuran ketimpangan yang mendasarkan ketimpangan wilayah pada konsep PDRB perkapita relatif. Ketimpangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006). Adapun rumus dari pendekatan PDRB perkapita relatif (Indeks Bonet) yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Arham (2014) sebagai berikut:

$$IQ_{i,t} = \frac{\text{PDRB kap}_{Kec\ i\ t}}{\text{PDRB kap}_{Kab\ t}} - 1$$

Dimana :

$IQ_{i,t}$ = Ketimpangan wilayah kecamatan i , pada tahun t

$PDRB_{kap\ kec\ i\ t}$ = PDRB perkapita Kecamatan i , pada tahun t

$PDRB_{kap\ kab\ t}$ = PDRB perkapita Kabupaten, pada tahun t

Dalam penghitungan ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB perkapita relatif ini digunakan data-data dalam lingkup wilayah yang lebih kecil yaitu dalam lingkup wilayah kecamatan. Jika indeks Bonet semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan ekonomi dan semakin mendekati angka 1 atau lebih maka ketimpangan ekonomi semakin melebar atau makin timpang.

2.1.6 Teori Basis Ekonomi

Inti dari teori basis ekonomi menurut Arsyad (1999:166) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Pendekatan basis ekonomi sebenarnya dilandasi pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan memproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien dan efektif. Lebih lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas 2 (dua) sektor, yaitu :

1. Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
2. Sektor non basis, yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri.

Berdasarkan teori ini, sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2.1.6.1. Analisis Shift Share

Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Untuk mengkaji kinerja berbagai sektor ekonomi yang berkembang di suatu daerah dan membandingkannya dengan perekonomian regional maupun nasional dapat digunakan teknik analisis *Shift Share*. Dengan teknik ini, selain dapat mengamati penyimpangan-penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) suatu wilayah juga dapat diketahui melalui teknik analisis *Shift Share* ini (Suparno, 2008:39)

Analisis *Shift Share* ini menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu di suatu wilayah. Menurut Budiharsono (2001:31), analisis *Shift Share* memiliki kemampuan untuk menunjukkan :

1. Perkembangan sektor perekonomian disuatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas,
2. Perkembangan sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya,
3. Perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah, dan
4. Perbandingan laju sektor-sektor perekonomian disuatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya

Dari persamaan (2) sampai (4) juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai tambah suatu sektor di suatu wilayah (D_{ij}) dapat diuraikan (*decomposed*) menjadi 3 komponen berpengaruh, yaitu :

1. Regional Share (N_{ij}): adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional atau Provinsi yang berlaku pada seluruh daerah.
2. Proportional Shift (M_{ij} atau PS): adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat secara nasional atau provinsi. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur, dan keragaman pasar. Disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*).
3. Differential Shift (C_{ij} atau DS): adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah. Disebut juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut dapat diketahui komponen atau unsur pertumbuhan yang mana yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai masing-masing komponen dapat saja negatif atau positif, tetapi jumlah keseluruhan akan selalu positif, bila pertumbuhan ekonomi juga positif dan begitu pula sebaliknya.

Field dan MacGregor (1993) menyatakan bahwa analisis pertumbuhan ekonomi regional komponen *proportional shift* (PS) dan *differential shift* (DS) lebih penting dibanding komponen *regional share*. Hal ini disebabkan karena DS

digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar penambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan PS untuk melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi (Yusuf, 1999).

Menurut Stevens (1980) yang dikutip Bappenas (2008) menyatakan Analisis *Shift Share* memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan analisis *Shift Share* ini antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *Shift Share* tergolong sederhana,
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat dan
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Sedangkan kelemahan dari analisis *Shift Share* antara lain :

1. Analisis ini hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*,
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik,
3. Terdapat data pada periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap,
4. Analisis ini tidak handal sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya,
5. Analisis ini tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor dan
6. Tidak ada keterkaitan antar daerah.

2.1.6.2. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Wilayah

Pada masa otonomi daerah saat ini, setiap daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk menentukan

arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat diperlukan informasi mengenai potensi ekonomi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996:48) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997:36) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2005:76).

Pada masa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keunggulan kompetitif mendapat perhatian lebih besar daripada keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan daerah untuk memasarkan produknya ke luar

daerah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi di suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di daerah lainnya. Keunggulan kompetitif merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan “*benchmark*” dalam suatu kurun waktu. Dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif, maka keunggulan komparatif suatu kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu pertanda awal bahwa kegiatan ekonomi tersebut punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Jika suatu sektor memiliki keunggulan komparatif karena besarnya potensi sektor tersebut maka kebijakan yang diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan ekonomi tersebut dapat berimplikasi kepada terciptanya keunggulan kompetitif. Kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu wilayah dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2005:95) :

1. Memiliki potensi sumber daya alam.
2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan keterampilan-keterampilan khusus.
3. Aksesibilitas wilayah yang baik.
4. Memiliki market yang baik atau dekat dengan market.
5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi.
6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki keterampilan baik dengan upah yang relatif rendah.
7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan : jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak bekerja sama dan disiplin.

8. Kebijakan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

2.1.7 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah, antara daerah maju dan daerah terbelakang, yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004: 26).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional melalui otonomi daerah dengan tujuan peningkatan kinerja daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang.

2.1.7.1. Hipotesis Kuznets

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang

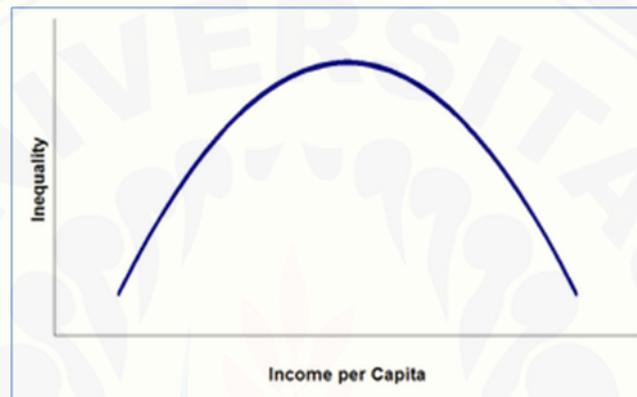
maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

Professor Kuznets, pelopor analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Kuznets menitikberatkan pada perubahan struktural yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Ketika peranan sektor industri semakin meningkat, maka terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri modern termasuk industri pengolahan dan jasa. Dalam transisi ekonomi ini, produktivitas tenaga kerja pada sektor modern lebih tinggi daripada produktivitas sektor pertanian sehingga pendapatan perkapita pada sektor modern juga akan lebih tinggi. Hasilnya, ketimpangan semakin meningkat pada tahap awal pembangunan dan kemudian menurun pada tahap selanjutnya. Observasi ini membentuk gambar kurva U terbalik yang dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznets (Sjafrizal, 2012: 108).

Simon Kuznets juga menyatakan bahwa konsep kurva “U-terbalik” karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan akan menurun seiring dengan peningkatan GNP per kapita pada tahap pembangunan selanjutnya. Penurunan jangka pendek dalam pertumbuhan pendapatan perkapita sering mengakibatkan ketimpangan yang menajam. Hipotesis Kuznets (U terbalik) dapat dibuktikan dengan membuat PDRB perkapita dan indeks kesenjangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson selama periode pengamatan. Kurva U-terbalik menggambarkan kesenjangan

distribusi pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap - tahap berikutnya (Kuncoro, 2004:110). Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets Gambar 3.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.



Sumber : Wikipedia.org. (2016)

Gambar 2.1 Kurva Kuznets U – Terbalik

Selanjutnya menurut Kuncoro (2004:110) dalam hal pembuktian kurva U-terbalik dapat dilakukan dengan menghubungkan antara angka indeks kesenjangan dengan pertumbuhan PDRB daerah kabupaten, dengan indikator apabila kedua angka indeks tersebut menggambarkan kurva U-terbalik, maka teori Kuznets berlaku untuk setiap daerah baik kabupaten atau provinsi di Indonesia, sebaliknya apabila kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva U-terbalik, maka teori Kuznets tidak berlaku.

2.1.7.2. Tipologi Daerah

Klassen Typology (Tipologi Klassen) adalah alat yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Klasifikasi daerah menurut Tipologi Klassen adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2002:18):

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di atasnya;
2. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di atasnya;
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di atasnya;
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di atasnya.

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu daerah lebih tinggi dibandingkan dengan indikator di daerah di atasnya, dan dikatakan “rendah” apabila indikator di suatu daerah lebih rendah dibandingkan dengan indikator di daerah di atasnya.

Menurut Sjafrizal (1997) pendekatan tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Dengan menggunakan alat tipologi Klassen pendekatan wilayah/daerah untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Pendekatan wilayah menghasilkan empat klasifikasi daerah yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah bertumbuh maju dan cepat (*rapid growth region/kuadran I*)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat, karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang di masa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*/kuadran II).

Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah berkembang cepat (*growing region*/kuadran III).

Daerah berkembang cepat (*growing region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Di masa mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*/kuadran IV).

Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif

rendah. Daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

2.1.8 Pembangunan Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun tingkat kualitasnya, karenanya dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:9) pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (UNDP), khususnya pilihan kesehatan serta pilihan pendidikan, dan dapat memenuhi standar hidup layak yang semuanya dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan dengan indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH); dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lamanya sekolah (RLS); serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (IDB).

Lebih lanjut menurut Badan Pusat Statistik, dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).

2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun yang telah disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas (metode lama):

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

$$\text{X2} = 1/3 \text{X12} + 2/3 \text{X22}$$

Dimana:

X1 = Lamanya hidup (tahun)

X2 = Tingkat Pendidikan; 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama bersekolah)

X3 = Pengeluaran riil per kapita (Rp 000.)

X12 = Rata – rata lama bersekolah (tahun)

X22 = Angka melek huruf (persen)

Sedangkan perhitungan IPM dengan metode baru, sebagai berikut :

$$\text{IPM} = \sqrt{\text{X1} \cdot \text{X2} \cdot \text{X3}}$$

UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam empat kategori, sebagai berikut:

1. Rendah bila angka $\text{IPM} < 50$
2. Menengah bawah bila angka $50 < \text{IPM} < 66$
3. Menengah atas bila angka $66 < \text{IPM} < 89$
4. Tinggi bila angka $\text{IPM} \geq 90$

2.1.9 Hubungan Antara Pembangunan Manusia Dengan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah

Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Menurut UNDP, dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia.

Dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini penting karena kebijakan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah yang memiliki keragaman sosial ekonomi yang tinggi.

Pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mungkin lebih penting dari investasi modal fisik. Ditemukan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara, pendidikan dan kesehatan memberi sumbangan amat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian kemampuan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok, hal ini sesuai dengan konsep model *human capital*. Pendidikan juga berfungsi dalam meningkatkan kesadaran sosial, politik dan budaya serta memacu

penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Karena itu hampir semua negara di dunia menempatkan pembangunan pendidikan sebagai kebijakan yang memiliki prioritas tertinggi.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan berhubungan terbalik (negatif) dengan disparitas pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan menurunkan kesenjangan pendapatan antar daerah. Dengan asumsi bahwa semakin banyak penduduk yang berpendidikan rendah (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), maka kesenjangan pendapatan antar daerah cenderung semakin tinggi tetapi jika semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (misalnya SLTA), maka tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah akan semakin turun. Dengan meningkatnya pendidikan tertentu akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada penggunaan modal fisik menjadi lebih efisien dan tenaga kerja akan menjadi lebih produktif. Dengan demikian, maka produktivitas baik modal fisik maupun tenaga kerja akan meningkat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dapat menurun.

Hasil penelitian Robello (1993) dan Sylwester (1999) dalam Adrianus (2003) ditemukan bahwa pengeluaran pendidikan tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berhubungan dengan ketimpangan pendapatan, artinya apabila ketimpangan pendapatan berkurang pengeluaran untuk pendidikan meningkat, sehingga pada akhirnya kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Selanjutnya hasil penelitian di atas diperkuat oleh hasil penelitian Sylwester (2002) yang mengatakan untuk negara yang mencurahkan banyak perhatian terhadap *public education* (persentase pendidikan terhadap GNP) mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

Menurut Ramirez *et al.* (1998) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik antara SDM dengan pertumbuhan ekonomi. Studi Ramirez berangkat dari

terdapatnya hubungan dua arah (*two way relationship*) antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, yaitu :

1. Dari Pertumbuhan Ekonomi ke *Human Development*

GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktifitas rumah tangga dan pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam membelanjakan pendapatannya, rumah tangga cenderung digunakan untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan. Umumnya masyarakat miskin lebih banyak menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pembangunan manusia tersebut. Pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan dengan adanya penciptaan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini yang memberikan peluang kepada orang miskin untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatannya.

Pemerintah memainkan peran alokasi dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, yaitu seberapa besar alokasi pengeluaran untuk sektor pembangunan manusia dan bagaimana proses pengalokasiannya. Sementara peranan organisasi masyarakat dan LSM adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam pembangunan manusia.

2. Dari *Human Development* ke pertumbuhan ekonomi

SDM yang baik, sehat dan berpendidikan baik akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya pembangunan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.

Jelas bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam pembangunan modal SDM. Peningkatan modal SDM akan meningkatkan produktifitas, kemampuan beradaptasi dan menggunakan teknologi dalam

produksi sehingga secara mikro akan mendorong produktifitas individu dan secara makro pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu daerah. Peningkatan pembangunan manusia akan membutuhkan investasi (modal) yang besar dan diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan.

2.2. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian mengenai analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu region/kawasan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, didapatkan hasil dan perbandingan penelitian dengan pembahasan yang terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Peneliti	Tujuan	Model & Variabel	Hasil Kajian
1	Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Jawa Timur 2008-2011 Shofwatun Hasnah, Universitas Indonesia; Jurnal BPPK, Volume 6 Nomor 2, 2013	Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011 dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar kabupaten/kota yang ada.	Ketimpangan = f (Dana Perimbangan, TK industri, TK terdidik, tenaga medis, UMR) Model yang terpilih adalah spatial error with fixed Effect Model Spatial Error $rginiit = \beta_1 penduduk + \beta_2 TK_{industri} + \beta_3 TK_{terdidik} + \beta_4 pertumbuhan_{ekoit} + \beta_5 PDR_{Bindit} + \delta_{it}$	Kenaikan dana perimbangan signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, dan faktor lainnya yang berpengaruh positif adalah faktor tenaga medis dan UMR. Sedangkan faktor tenaga kerja industri ternyata signifikan berpengaruh negatif terhadap indeks ketimpangan di Jawa Timur.

No	Judul, Peneliti	Tujuan	Model & Variabel	Hasil Kajian
2	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan; Astari Khairunnisa Paldi Hidayat, SE, M.Si, 2014	Mendiskripsikan kesenjangan pembangunan antar kecamatan Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan	Analisis deskriptif kuantitatif. analisis Klassen Typologi, dan Williamson Index.	Analisis Klassen Typologi menunjukkan bahwa terdapat tipologi yang mengarah pada daerah yang relatif tertinggal analisis Indeks Wiliamson menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak kecamatan dengan nilai IW yang meningkat.
3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012; Mochamad Haris Hidayat Skrispsi S1 FE UNDIP 2014	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah	Data sekunder berupa data panel yang terdiri dari silang waktu periode 2005-2012 dan silang tempat 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi ini adalah metode pendekatan FEM (Fixed Effect Model)	Variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan
4	Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus Propinsi Jawa	Untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain	Analisis indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan	Nilai ketimpangan yang tergolong rendah, hipotesis

No	Judul, Peneliti	Tujuan	Model & Variabel	Hasil Kajian
	Timur Tahun 2005-2011) Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, Nomor 4	itu juga apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan.	bantuan SPSS	Kuznets berlaku di Provinsi ini. variabel, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan.
5	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010” Trias Dewi Yunisti (2012), Tesis, Universitas Indonesia.	Mendeskripsikan ketimpangan pembangunan di Propinsi Banten	Indeks Williamson, Indeks Theil, Tipologi Klassen, Korelasi Pearson	Ketimpangan pembangunan manusia cenderung menurun, Lama Sekolah (RLS) memiliki korelasi paling kuat dengan ketimpangan IPM.
6	Disparitas Pendapatan dan faktor yang berpengaruh terhadap IPM di Kab Bekasi Jaoharul Alam (2007), Tesis, Universitas Indonesia.	Diskripsi Disparitas dan pengaruh variabel ekonomi dan sosial terhadap IPM	Indeks Intropi dan Model Regresi	Ketimpangan antar kecamatan sangat tinggi dan cenderung meningkat. PDRB, rasio guru, kepadatan penduduk dan Akses RT pada air bersih berpengaruh terhadap kesejahteraan

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam proses pembangunan daerah akan selalu timbul ketimpangan atau dapat disebut juga disparitas antar wilayah, baik disparitas spasial, disparitas sektoral maupun disparitas ekonomi. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya selalu terdapat perbedaan kandungan sumberdaya alam pada masing-masing wilayah, perbedaan kondisi demografis, perbedaan kondisi infrastruktur, dan perbedaan alokasi dana pembangunan antar wilayah, yang merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan dari pembangunan itu sendiri. Dari sisi ekonomi, disparitas sektoral maupun disparitas pendapatan dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan pendapatan perkapita masyarakat di masing-masing wilayah tersebut melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

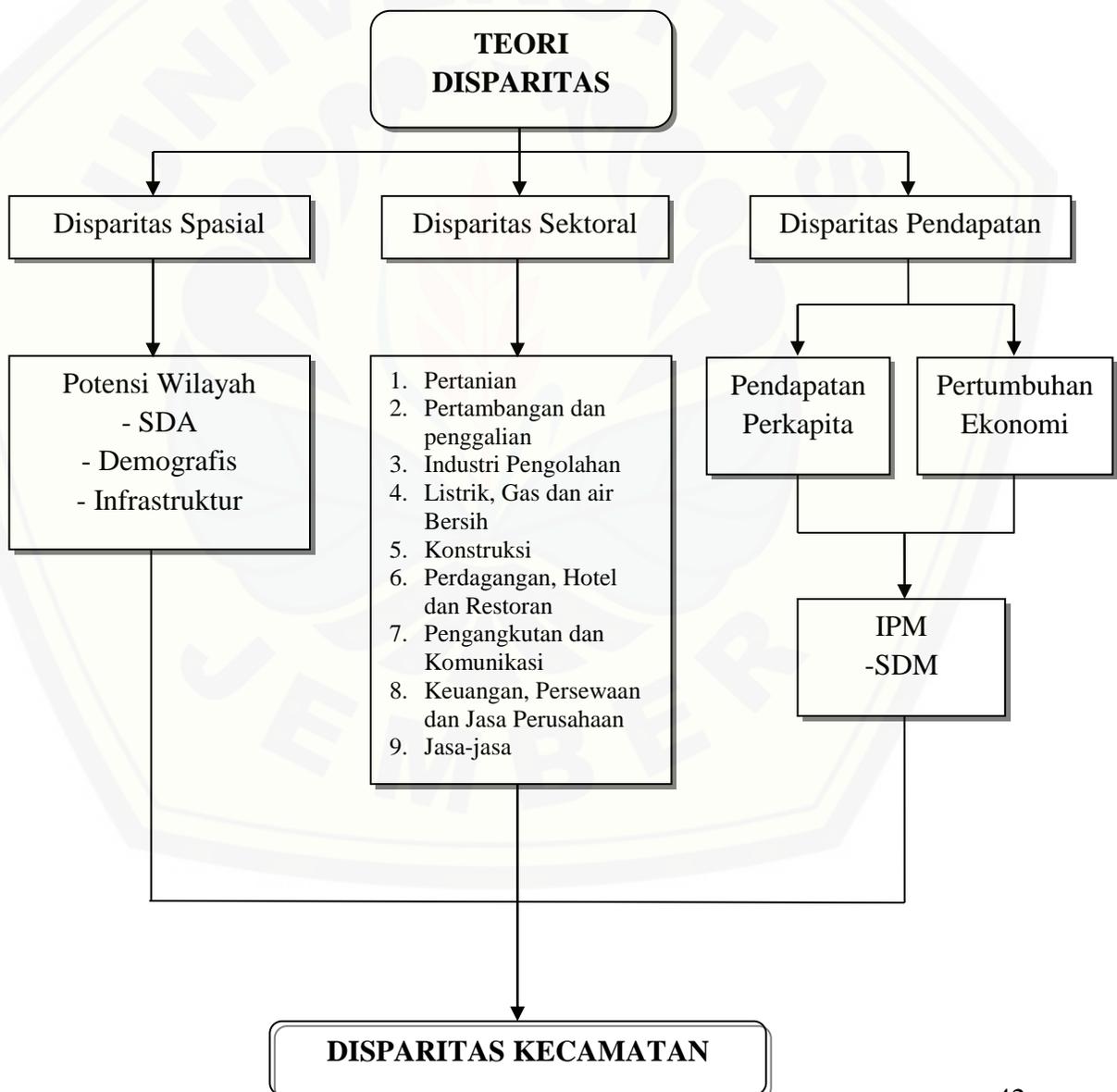
Dalam proses pembangunan, sumber daya manusia merupakan modal dasar yang penting. Hal ini karena manusia merupakan pelaku utama atau subyek pembangunan itu sendiri, sehingga kualitas manusia menjadi salah satu modal dasar keberhasilan suatu pembangunan, sehingga pembangunan manusia juga merupakan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat disamping pembangunan ekonomi. Ukuran pembangunan manusia dinyatakan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Seperti yang dikatakan oleh para ahli ekonomi modern bahwa pembangunan manusia sebagai pembentukan modal insani merupakan proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk. Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep *Human Capital* yaitu bahwa peningkatan ilmu pengetahuan berdampak pada berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, ketrampilan, keahlian, kemampuan, dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dalam

pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun tingkat kualitasnya.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu serta pengkajian antara pertumbuhan ekonomi, serta IPM dengan ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian adalah pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada 23 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso yaitu: Kecamatan Maesan, Grujugan, Tamanan, Jambesari Darus Sholah, Pujer, Tlogosari, Sukosari, Sumber Wringin, Tapen, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso, Curahdami, Binakal, Pakem, Wringin, Tegal Ampel, Taman Krocok, Klabang, Botolinggo, Sempol, Prajekan dan Cermee tahun 2014-2015.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2006-2012. Data tersebut sebagai berikut :

1. PDRB Provinsi Jawa Timur ADHK 2000 periode tahun 2006-2012
2. PDRB Kabupaten Bondowoso ADHK 2000 periode tahun 2006-2012.
3. PDRB Kecamatan di Kabupaten Bondowoso ADHK 2000 periode tahun 2006-2012.
4. PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso ADHK 2000 periode tahun 2006-2012.
5. PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Bondowoso ADHK 2000 periode 2006-2012.
6. Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012.
7. Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bondowoso tahun 2006-2012.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Bondowoso dan Bappeda Kabupaten Bondowoso.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang diolah dari pihak kedua. Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka tidak dilakukan pengumpulan data primer sehingga tidak diperlukan teknik sampling atau kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang didapatkan dari BPS dan Bappeda Kabupaten Bondowoso maupun melalui literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

3.4. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), dua variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan wilayah di kecamatan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2006-2012. Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kuncoro (2004:114) mengemukakan bahwa untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan harga konstan (PDRB riil) karena akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena tidak memasukkan inflasi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam konteks regional/wilayah, dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Sedangkan untuk menghitung pendapatan perkapita (BPS, 2013), digunakan rumus :

$$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

3.5.2 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Agar dapat mendeskripsikan secara lebih jelas serta mempertimbangkan aksesibilitas data maka digunakan ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB perkapita relatif. Kesenjangan wilayah diukur dengan menggunakan Pendekatan PDRB Perkapita relatif dimana pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) dalam Arham (2014). Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan konsep Indeks Williamson dalam menghitung ketimpangan wilayah disamping digunakan juga Tipologi Klassen untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

3.5.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat untuk menganalisis tingkat ketimpangan suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:9) dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).

3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun yang telah disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas (metode lama):

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

$$\text{X2} = 1/3 \text{X12} + 2/3 \text{X22}$$

Dimana:

X1 = Lamanya hidup (tahun)

X2 = Tingkat Pendidikan; $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama bersekolah)

X3 = Pengeluaran riil per kapita (Rp 000.)

X12 = Rata – rata lama bersekolah (tahun)

X22 = Angka melek huruf (persen)

UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam empat kategori, sebagai berikut:

1. Rendah bila angka $\text{IPM} < 50$
2. Menengah bawah bila angka $50 < \text{IPM} < 66$
3. Menengah atas bila angka $66 < \text{IPM} < 89$
4. Tinggi bila angka $\text{IPM} \geq 90$

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan didekati dengan model regresi panel data yang diduga dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM. Dalam mendeteksi ketimpangan

pendapatan antar wilayah dengan pendekatan deskripsi menggunakan pendapatan perkapita relatif indeks Bonet, indeks Williamson dan didukung tipologi Klassen.

3.6.1 Analisis Kesenjangan Wilayah

3.6.1.1 Analisis Ketimpangan Pendapatan Wilayah Relatif

Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah juga dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Perkapita relatif dalam mengukur kesenjangan wilayah. Adapun rumus dari pendekatan PDRB perkapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) dalam Arham (2014) sebagai berikut:

$$IQ_{i,t} = \frac{PDRB \text{ kap}_{Kec i t}}{PDRB \text{ kap}_{Kab t}} - 1$$

Dimana :

$IQ_{i,t}$ = Ketimpangan wilayah kecamatan i, pada tahun t

$PDRB \text{ kap}_{Kec i t}$ = PDRB perkapita Kecamatan i, pada tahun t

$PDRB \text{ kap}_{Kab t}$ = PDRB perkapita Kabupaten, pada tahun t

Dalam penghitungan ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB perkapita relatif ini digunakan data-data dalam lingkup wilayah yang lebih kecil yaitu dalam lingkup wilayah kecamatan. Jika indeks Bonet semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan ekonomi dan semakin mendekati angka 1 atau lebih maka ketimpangan ekonomi semakin melebar atau makin timpang.

3.6.1.2 Indeks Williamson

Untuk menghitung ketimpangan pembangunan untuk seluruh Kabupaten Bondowoso tahun 2006-2012 dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997) dengan rumus sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB per kapita di Kecamatan i.
- Y = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Bondowoso
- f_i = jumlah penduduk di Kecamatan i
- n = jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso

Besarnya Iw adalah $0 < Iw < 1$

Iw = 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata

Iw = 1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna)

Iw ~ 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata

Iw ~ 1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

- Bila IW ----- $< 0,3$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah
- Bila IW ----- $= 0,3 - 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah sedang
- Bila IW ----- $> 0,4$ artinya : ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Menurut Sutarno (2003) Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten di satu provinsi tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB per kapita rata-rata daerah lain.

3.6.1.3 Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typologi* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan perkapita daerah (Kuncoro, 2002:18). Menurut Tipologi Klassen, perkembangan pembangunan antar daerah kecamatan di Kabupaten Bondowoso dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
2. Daerah maju tetapi tertekan (*Low growth but high income*)
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Alat analisis Klassen Typologi (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen membagi daerah dan pendapatan perkapita daerah tersebut. Menurut Sjafrizal (1997) wilayah yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah. Sektor ekonomi di tiap wilayah yang memiliki karakteristik pertumbuhan dan pangsa yang berbeda-beda dapat diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan sektoral. Tabel 3.1. di bawah ini menunjukkan klasifikasi sektoral/daerah tipologi Klassen.

Tabel 3.1 Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/Daerah

Kuadran I	Kuadran II
Sektor/Daerah Maju dan Tumbuh Cepat $g_i > g, g_{ki} > g_k$	Sektor/Daerah Yang Sedang Tumbuh $g_i < g, g_{ki} > g_k$
Kuadran III	Kuadran IV
Sektor/Daerah Maju Tapi Tertekan $g_i > g, g_{ki} < g_k$	Sektor/Daerah Relatif Tertinggal $g_i < g, g_{ki} < g_k$

Sumber :Sjafrizal (1997)

Dimana :

g_{ki} = PDRB Perkapita Wilayah i

g_i = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Wilayah i

g_k = PDRB Perkapita Wilayah referensi

g = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Wilayah referensi

3.6.1.4 Analisis Shift Share

Menurut Suparno (2008) metode analisis *Shift Share* diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor - i di suatu region - j (D_{ij}) dengan formulasi:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

di mana:

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \dots\dots\dots (2)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n) \dots\dots\dots (3)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n) \dots\dots\dots (4)$$

Dari persamaan (2) sampai (4), r_{ij} mewakili pertumbuhan sektor/subsektor i di wilayah j , sedangkan r_n dan r_{in} masing-masing laju pertumbuhan agregat nasional/provinsi dan pertumbuhan sektor/subsektor i secara nasional/provinsi, yang masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E_{ij,t} - E_{ij})/E_{ij} \dots\dots\dots (5)$$

$$r_{in} = (E_{in,t} - E_{in})/E_{in} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_n = (E_{n,t} - E_n)/E_n \dots\dots\dots (7)$$

Dimana :

$D_{i,j}$ = Perubahan PDRB sektor (subsektor) i di suatu wilayah

$N_{i,j}$ = Perubahan PDRB sektor (subsektor) i di suatu wilayah disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi secara nasional

$M_{i,j}$ = Perubahan PDRB sektor (subsektor) i di suatu yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor (subsektor) i secara nasional

$C_{i,j}$ = Perubahan PDRB sektor (subsektor) i di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor (subsektor) tersebut di suatu wilayah

E_{ij} = PDRB sektor i di suatu wilayah tahun awal analisis

E_{in} = PDRB sektor i di wilayah regional tahun awal analisis

E_n = PDRB total di wilayah regional tahun awal analisis

$E_{ij,t}$ = PDRB sektor i di suatu wilayah tahun akhir analisis

$E_{in,t}$ = PDRB sektor i di wilayah regional tahun akhir analisis

$E_{n,t}$ = PDRB total di wilayah regional tahun akhir analisis

3.6.2 Korelasi Pearson (Pembuktian Hipotesis Kuznets)

Uji korelasi ini untuk melihat apakah ada hubungan antar 2 kuantitatif variabel kontinu. Koefisien *Pearson Correlation* (r) adalah ukuran untuk melihat seberapa kuat hubungan antar 2 variabel. Nilai koefisien *Pearson Correlation* (r) berkisar antara -1 sampai +1. Hasil korelasi pearson dapat dilihat dari nilai signifikansi, bentuk korelasi positif atau negatif, apabila hubungan 2 variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi pearson nilainya kurang atau lebih dari nol (0), apabila menunjukkan tidak adanya korelasi, nilainya adalah nol (0). Nilai korelasi yang positif berarti arah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain adalah satu arah, dengan kata lain apabila, terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB maka peningkatan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan regional. Dalam kajian ini analisis ini dipergunakan untuk membuktikan hipotesis Kuznets yang menduga hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Rumus untuk mencari nilai r (Kuncoro, 2004:110) sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right) \left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

Dalam *Pearson Correlation*, terdapat *rule of thumb* nilai korelasi tersebut, sebagai berikut:

>+0.70	: hubungan positif sangat kuat
+0.40 to +0.69	: hubungan positif kuat
+0.30 to +0.39	: hubungan positif moderat
+0.20 to +0.29	: hubungan positif lemah
+0.01 to +0.19	: tidak ada hubungan
-0.01 to -0.19	: tidak ada hubungan
-0.20 to -0.29	: hubungan negatif lemah
-0.30 to -0.39	: hubungan negatif moderat
-0.40 to -0.69	: hubungan negatif kuat
<-0.70	: hubungan negatif sangat kuat

3.6.3 Model Regresi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Fixed Effect Model* untuk mengolah data panel. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003:18). Estimasi model regresi dengan data panel dapat menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*. Estimasi tergantung pada asumsi yang digunakan pada konstanta, koefisien kemiringan, dan *variabel error*. Ada beberapa kemungkinan:

1. Konstanta dan koefisien kemiringan konstan antar ruang dan waktu, dan variabel error menangkap perbedaan waktu dan individu.
2. Koefisien kemiringan konstan tetapi konstanta bervariasi antara individu, salah satu cara memasukan tiap unit *cross section* dalam perhitungan yaitu dengan membiarkan konstanta bervariasi antar unit *cross section* namun tetap mengasumsikan bahwa koefisien kemiringan adalah konstan antar unit *cross section*.
3. Koefisien kemiringan konstanta tetapi konstanta bervariasi antara individu dan waktu.
4. Semua koefisien (konstanta dan koefisien kemiringan) bervariasi antara individu.
5. Konstanta dan koefisien kemiringan bervariasi antara individu dan waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Model fungsi yang digunakan merupakan model fungsi produksi, yaitu:

$$\text{Ketimpangan} = f(\text{PE}, \text{IPM})$$

Model linier ditransformasikan ke dalam bentuk semilogaritma, sehingga persamaannya:

$$\text{Ketimpangan}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + e$$

Dimana:

Ketimpangan = Ketimpangan pendapatan antar wilayah

PE = Pertumbuhan ekonomi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

i = Cross section

t = Time series

β = Koefisien
e = *Error term*

3.6.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

3.6.4.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah salah satu pelanggaran asumsi klasik bahwa suatu model regresi dikatakan baik. Asumsi yang seharusnya dipenuhi adalah bahwa antar variabel bebas tidak terdapat korelasi sehingga estimasi parameter koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas benar-benar menggambarkan pengaruhnya terhadap variabel tak bebas. Penyakit ini terjadi jika pada regresi linear berganda terdapat hubungan antar variabel bebas. Jika suatu model regresi terjangkit penyakit multikolinearitas, maka akan menimbulkan kesulitan untuk melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan (Gujarati, 2003:18).

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 dan nilai t statistik yang signifikan. Apabila nilai R^2 yang tinggi hanya diikuti oleh sedikit nilai t statistik yang signifikan, maka mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Selain itu, kita juga dapat mendeteksi penyakit multikolinearitas dengan melihat *correlation matrix*, dimana batas korelasi antara sesama variabel bebas tidak lebih dari |0,8| (Ghozali, 2005:91).

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik; yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka kita mempunyai heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak merusak sifat ketidakhiasan dan konsistensi dari penaksir *OLS*. Permasalahannya penaksir ini tidak lagi mempunyai varians minimum atau efisien, dengan perkataan lain mereka tidak lagi *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*). Penaksir *BLUE* diberikan oleh metode kuadrat terkecil tertimbang (Gujarati, 2003:72).

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam sebuah model, dapat menggunakan uji White. Uji ini secara manual dapat dilakukan dengan melakukan regresi dengan menempatkan residual kuadrat sebagai variabel dependen terhadap variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n * R^2$. Pengujiannya adalah jika $X^2 < X^2_{tabel}$, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak (Gujarati, 2003:413).

3.6.4.3 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005:110) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005:147).

3.6.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi lain (disturbansi). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan pengujian terhadap

nilai uji *Durbin Watson (DW)* dan *LM test*. Hasil uji autokorelasi menggunakan *DW test* sebagai berikut (Ghozali, 2005:95):

Tabel 3.2 Uji Statistik Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Terima	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali (2005)

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil Uji Durbin Watson dengan tabel Durbin Watson.

Aturan perbandingan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Sumber : Ghozali (2005)

Gambar 3.1 Aturan Membandingkan Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson.

3.6.5 Pengujian Statistik

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan antara variabel independen yang digunakan dengan variabel dependen. R^2 adalah angka yang menunjukkan besarnya proporsi atau persentase variasi variabel dependen yang

dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Besarnya R^2 berada diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 nilai R^2 berarti dapat dikatakan bahwa model variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen mendekati 100%. Ukuran R^2 akan semakin mengecil jika semakin banyak variabel independen yang digunakan (Ghozali, 2005:45).

3.6.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Menurut Ghozali (2005:84) Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- a) $H_0 : \alpha_1 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.
- b) $H_1 : \alpha_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.
- a) $H_1 : \alpha_2 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel IPM secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.
- b) $H_1 : \alpha_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel IPM secara individu terhadap variabel ketimpangan wilayah.

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah ditulis dalam bab 4, maka 3 (tiga) kesimpulan bisa disajikan sebagai berikut;

1. Analisis kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso :

a) Hasil analisis kesenjangan di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tingkat kesenjangan tinggi. Angka IW di Kabupaten Bondowoso adalah sangat tinggi yakni tahun 2006 sebesar 0.75790 dan tahun 2012 sebesar 0.92104. Kesenjangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi dan secara keseluruhan Indeks Williamson tersebut cenderung meningkat ketimpangannya. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Bonet tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Terdapat 11 kecamatan yang memiliki kecenderungan ketimpangan pendapatannya menurun pada tahun 2012 dibanding tahun 2006 yaitu Kecamatan Maesan, Grujugan, Wonosari, Tenggarang, Bondowoso, Curahdami, Binakal, Taman Krocok, Botolinggo, Prajekan dan Cermee.
- 2) Terdapat 12 kecamatan yang memiliki kecenderungan ketimpangan pendapatannya naik pada tahun 2012 dibanding tahun 2006 yaitu Kecamatan Tamanan, Jambesari DS, Pujer, Tlogosari, Sukosari, Sumber Wringin, Tapen, Pakem, Wringin, Tegalampel, Klabang dan Sempol.

b) Hasil analisis Tipologi Klassen dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Empat kecamatan yang dahulu termasuk kategori “maju dan tumbuh cepat” menurun menjadi “berkembang cepat” atau bahkan “maju tapi tertekan” dalam pendapatan per kapitanya. Sebaliknya empat kecamatan naik statusnya bahkan ada yang melompat dari “relatif tertinggal” menjadi “maju dan tumbuh cepat” yakni Tamanan dan Wringin, atau dari “maju tapi tertekan” menjadi “maju dan tumbuh cepat” yakni Cermee sedang satu kecamatan yakni Tapen berubah dari

“berkembang cepat” menjadi “maju dan tumbuh cepat”.

- 2) Dua kecamatan yang sampai tahun 2012 masih belum beranjak dari kondisi “relatif tertinggal” yakni Jambesari DS dan Sumberwringin.
 - 3) Dua kecamatan yang dulu termasuk kategori “berkembang cepat” menjadi “relatif tertinggal” yakni Wonosari dan Tenggarang.
- c) Secara spasial hampir semua kecamatan di wilayah kabupaten Bondowoso berada pada tingkat kesenjangan relatif yang mendekati 0.0807 dan tertinggi adalah 0.4157. Berdasarkan hasil perhitungan kesenjangan pendapatan antar wilayah tersebut ada dua hal yang perlu diwaspadai yakni variasi atau standar deviasi nilai kesenjangan pendapatan relatif Bonet antar kecamatan dan trend perkembangan masing-masing kecamatan. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel tersebut variasinya terlihat sangat tinggi.
2. Analisis hubungan antar variabel di Kabupaten Bondowoso :
- a) Dari matrik korelasi Pearson, diperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan adalah positif yaitu 0,841 dan nilai signifikansinya 0,018 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana pertumbuhan ekonomi naik akan menyebabkan ketimpangan pembangunan justru meningkat. Sehingga hipotesis Kuznets tentang U-terbalik tidak berlaku di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2006-2012.
 - b) Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan ($t_{hitung} < t_{tabel}$) terhadap ketimpangan antar wilayah. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Bonit (Ketimpangan Pendapatan Relatif) yang maknanya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan IPM memiliki nilai pengaruh negatif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan antar wilayah ($t_{hitung} < t_{tabel}$). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan tingkat mutu modal

manusia (IPM) akan menurunkan kesenjangan pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2006-2012.

3. Gambaran struktur ekonomi Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

- 1) Kemampuan Kabupaten Bondowoso untuk menangkap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2006-2012 dengan total output sebesar Rp 882,63 milyar. Sumbangan terbanyak adalah sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar Rp. 324,49 milyar atau 36,76%. Sektor pertanian sebagai sektor basis karena keterlibatan jumlah tenaga kerja yang paling besar hanya Rp. 206,27 milyar atau 23,37% dan disusul oleh industri pengolahan sebesar Rp. 143,50 milyar atau 16,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Timur membawa dampak positif bagi tingkat perkembangan PDRB Kabupaten Bondowoso. Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian regional Kabupaten Bondowoso tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur adalah sektor perdagangan hotel dan restoran dengan angka komponen NG yang paling tinggi dari seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bondowoso.
- 2) Besaran perubahan ekonomi akibat efek bauran industri, bahwa bauran industri memberikan efek negatif terhadap perekonomian Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan sebesar -Rp. 269,53 milyar. Atau dapat dikatakan kemampuan tumbuh Kabupaten Bondowoso karena faktor dalam sendiri (internal) secara keseluruhan bernilai negatif. Namun jika ditinjau secara sektoral maka hanya sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, dan diikuti sektor bangunan yang lambat kemajuan atau pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor yang sama pada level perekonomian Provinsi Jawa Timur, sebab empat sektor ini memiliki nilai IM sektoral yang negatif, sedangkan lima sektor ekonomi yang lain sudah tergolong maju atau cepat pertumbuhannya dibandingkan

sektor yang sama pada level perekonomian Provinsi Jawa Timur sebab sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki nilai IM yang positif.

- 3) Secara keseluruhan perekonomian regional Kabupaten Bondowoso memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang tinggi atau cepat terhadap perekonomian Jawa Timur. Hal ini terlihat pada nilai RS total Rp. 122,13 milyar. Secara sektoral, ada empat sektor ekonomi di Kabupaten Bondowoso memiliki nilai RS yang positif. Sektor pertanian memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif yang paling tinggi diantara sektor lainnya di Kabupaten Bondowoso. Sektor-sektor yang memiliki nilai RS yang positif mengandung arti bahwa sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki daya saing yang kuat atau memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada lingkup perekonomian Jawa Timur.
- 4) Total pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut Kabupaten Bondowoso menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 735,22 milyar dimana sumbangan paling banyak adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar Rp. 379,96 milyar atau sekitar 51,68%, sektor pertanian penyumbang pertumbuhan relatif kecil yakni sebesar Rp 32 milyar atau sebesar 4,37%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan memenuhi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Indeks kesenjangan pendapatan di Kabupaten Bondowoso sangat tinggi hal ini mengimplikasikan sebaiknya ada perubahan orientasi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk lebih menekankan pada pemerataan alokasi pembangunan antar wilayah kecamatan. Perhatian harus difokuskan kepada wilayah yang tertinggal.
2. Terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan

pembangunan justru meningkat. Hasil ini didapatkan baik oleh korelasi Pearson maupun hasil analisis regresi. Implikasi kebijakan sebaiknya harus tetap memacu pertumbuhan ekonomi tetapi disertai upaya realokasi pada APBD di Kabupaten Bondowoso, selain diarahkan pada wilayah kecamatan tertinggal juga diarahkan kepada pengembangan potensi sektor basis dan peningkatan manajemen di sektor perdagangannya sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh Kabupaten Bondowoso.

3. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan IPM terbukti signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sebaiknya pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat membuat kebijakan untuk mengatur kedua variabel tersebut sehingga disparitas pembangunan dapat terkontrol dengan baik.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menambah variabel yang akan diteliti. Sehingga variabel yang diteliti nantinya mampu mewakili faktor apa saja yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN BPFE.
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Bappeda Kabupaten Bondowoso. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031*. Bondowoso : Bappeda Kabupaten Bondowoso.
- Bonet, J. 2006. *Decentralization, Structural Change and Regional Disparities in Colombia*. Urbana-Campaign, Regional Planning in the Graduate College University of Illinois.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.
- Daryanto, A. dan Hafizrianda, Y, 2010. *Analisis Input-Output dan Sosial Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor : IPB Press.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*. Cetakan pertama. Yogyakarta : Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.
- _____. 2002. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- _____. 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mawardi, I. 1997. *Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. *Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Rahardja, P. dan Manurung, M., 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Padang: Baduose Media.
- _____. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2006. *Beberapa Aspek Persoalan Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta : FEUI.
- Suparno, 2008. *Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan Kawasan Sulawesi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tumenggung, S. 1996. *Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)*. Jakarta : Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departemen PU.

JURNAL/BULETIN/TERBITAN BERKALA

Andrianus, F. 2003. *Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (1970-2000)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Arham, M. A. 2014. *Desentralisasi Fiskal Dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi Dan Jawa*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan—Volume 18. Nomor 4. 431–451. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

Aswandi, H dan Kuncoro, M. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Volume 17, Nomor 1.

Badan Pusat Statistik. 2007. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2007a. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2007b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2008a. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2008b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2008c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

_____. 2009a. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

_____. 2009b. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

- _____. 2009c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2009d. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2010a. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2010b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2010c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2011a. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2011b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2011c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2012a. *Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur 2007-2011*. Surabaya : Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- _____. 2012b. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2012*. Surabaya : Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- _____. 2012c. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2012d. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

- _____. 2012e. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2012f. *PDRB Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2007-2011*. Surabaya : Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- _____. 2013a. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2013b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2013c. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan*. Bondowoso : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- Dartanto, T. dan Bambang, P. S. B. 2003. *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisa Model Ekonomi Makro Simultan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. 4, No. 1 Juli.
- Hasnah, S. 2013. *Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Jawa Timur 2008-2011*. Universitas Indonesia ; Jurnal BPPK, Volume 6 Nomor 2.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma LP3S. Tahun XXVI No.3. 3-16.
- Nurhuda, R. Muluk, M.R.K., Prasetyo, W.Y. 2014. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, Nomor 4.
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES. No 3 Tahun XXVI, 27-38.
- Sutarno. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 2 Desember 2003 hal 97-110. Yogyakarta : FE UII.

Yusuf, M. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model : Wilayah Bangka Belitung*. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/HASIL PENELITIAN

Khairunnisa, A., Hidayat, P. 2014. “*Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan*”. Tidak Diterbitkan. Medan : Universitas Andalas.

Hidayat, M.H. 2014. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*”. Tidak Diterbitkan. Skripsi S1. Semarang : FE UNDIP.

Yunisti, T.D. 2012. “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2010*”. Tidak Diterbitkan. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.

Alam, J. 2007. “*Disparitas Pendapatan dan faktor yang berpengaruh terhadap IPM di Kab Bekasi*”. Tidak Diterbitkan. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.

INTERNET

Bappenas, 2008. *Modul Isian Daerah Untuk Simrenas*. www.bappenas.go.id/files/4013/5648/9798/modul-isian.pdf.

Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. <http://www.wwz.unibaz.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>. diakses 25 September 2013.

Ramirez, Alejandro, Gustav Ranis, Frances Stewart. 1998. *Economic Growth and Human Development*. Journal. [www. google.com](http://www.google.com).

Wikipedia.org. 2016. *Kuznets Curve*. Free Encyclopedia. [www. google.com](http://www.google.com).

LAMPIRAN A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2006-2013

No.	Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	1.201.943,71	1.265.438,72	1.324.723,16	1.386.351,80	1.455.083,44	1.511.079,50	1.570.229,23	1.627.483,36
2.	Pertambangan & Penggalian	19.592,04	20.886,66	21.886,24	22.928,39	24.047,33	24.883,57	25.680,31	26.752,53
3.	Industri Pengolahan	413.983,52	442.681,08	462.620,14	484.801,65	511.257,17	544.589,62	583.371,71	621.165,28
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	17.781,24	18.611,00	19.380,67	20.245,16	21.189,91	22.322,75	24.133,13	25.474,80
5.	Konstruksi	29.748,40	31.938,17	33.595,78	35.396,62	37.502,01	40.856,39	44.845,52	49.296,92
6.	Perdag., Hotel dan Restoran	568.280,50	595.403,71	637.492,44	673.965,20	721.933,43	796.909,09	880.228,37	970.605,18
7.	Pengangkutan & Komunikasi	38.421,96	39.867,54	41.944,31	44.209,97	46.635,53	50.597,62	55.072,85	59.996,55
8.	Keu, Persewaan & Jasa Perush.	61.701,74	64.258,00	68.261,92	71.967,52	76.484,30	82.584,42	89.450,19	96.779,08
9.	Jasa-jasa	201.478,32	214.478,59	226.821,38	239.040,49	252.849,15	268.141,15	284.672,45	303.020,72
Jumlah		2.552.931,43	2.693.563,47	2.836.726,04	2.978.906,80	3.146.982,26	3.341.964,11	3.557.683,76	3.780.574,42

LAMPIRAN B. PDRB PROVINSI JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2000-2011 (MILYAR)

Sektor/Sub Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	46.486.277,60	47.942.973,38	48.315.111,68	50.208.896,71	51.329.548,83	52.628.433,15	54.463.942,77	55.330.095,90
Pertambangan Dan Penggalian	5.455.159,57	6.024.793,19	6.645.089,71	7.104.816,81	7.757.319,82	8.228.632,48	8.401.262,86	8.697.627,56
Industri Pengolahan	72.786.972,17	76.163.917,97	81.033.880,59	83.299.893,42	86.900.779,13	92.171.191,46	98.017.056,47	103.497.232,68
Listrik Dan Air Bersih	4.610.041,67	5.154.634,88	81.033.880,59	4.361.515,81	4.642.081,81	4.932.084,36	5.238.431,69	5.486.499,10
B a n g u n a n	9.030.294,53	9.139.600,65	9.887.403,83	10.307.883,76	10.992.599,76	11.994.825,72	12.840.565,41	14.006.020,59
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	81.715.963,35	88.570.614,49	90.911.382,23	95.983.867,09	106.229.112,97	116.645.214,35	128.375.498,60	139.431.307,45
Pengangkutan Dan Komunikasi	15.504.939,79	16.710.214,85	20.164.063,96	22.781.527,67	25.076.424,92	27.945.256,13	30.640.913,33	33.837.742,37
Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	13.611.228,97	14.763.619,88	16.519.146,41	17.395.393,53	18.659.490,17	20.186.109,19	21.802.468,45	23.455.842,04
Jasa - Jasa	22.048.439,04	23.343.814,62	27.816.461,60	29.417.374,11	30.693.407,48	32.251.530,62	33.886.297,81	35.686.078,02
TOTAL	271.249.316,69	287.814.183,91	382.326.420,60	320.861.168,91	342.280.764,89	366.983.277,46	393.666.437,39	419.428.445,71

**LAMPIRAN C. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN BONDOWOSO ADHK TAHUN 2000 PERIODE TAHUN 2006-2012
(DALAM JUTA RUPIAH)**

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	163.055,86	171.509,65	184.069,18	191.184,11	216.781,85	203.487,23	227.412,75
2	Grujugan	147.780,81	149.654,22	166.559,71	176.384,93	188.646,41	186.219,92	179.812,77
3	Tamanan	100.208,81	105.908,18	107.187,57	114.367,54	122.956,17	153.005,47	197.955,61
4	Jambesari DS	85.286,89	85.933,75	89.627,29	92.308,59	95.164,20	112.720,66	98.142,08
5	Pujer	131.514,71	146.714,65	147.632,68	152.950,85	157.822,06	142.935,18	156.044,54
6	Tlogosari	130.350,34	127.890,97	151.638,45	158.533,65	169.709,90	156.489,88	169.741,11
7	Sukosari	58.364,10	65.954,84	66.285,05	70.686,41	75.363,86	93.836,46	91.164,52
8	Sbr. Wringin	95.828,45	105.377,01	109.334,99	114.030,83	118.532,65	120.779,49	128.755,97
9	Tapen	139.406,05	145.356,83	150.710,67	156.317,27	159.717,49	180.293,03	205.013,19
10	Wonosari	151.863,97	152.284,72	150.526,90	156.733,54	167.652,99	184.580,79	184.751,87
11	Tenggarang	174.075,84	181.438,25	160.719,72	167.707,40	161.762,40	178.625,73	160.284,95
12	Bondowoso	310.480,73	314.263,26	322.721,83	339.890,66	398.867,14	411.878,92	428.938,89
13	Curahdami	90.759,18	96.209,49	106.350,78	111.504,79	120.608,82	112.459,64	130.188,92
14	Binakal	65.676,22	69.892,40	80.475,91	83.302,63	77.697,07	60.451,50	69.430,48
15	Pakem	81.046,97	85.571,50	85.893,80	90.850,47	91.117,24	77.998,21	95.719,99
16	Wringin	141.700,90	148.596,20	152.348,02	157.701,66	164.966,93	157.403,27	218.368,32
17	Tegalampel	72.382,11	77.682,68	87.588,97	90.580,71	93.410,45	87.234,75	99.523,49
18	Taman Krocok	44.168,02	52.529,30	57.157,25	61.834,92	67.672,60	84.801,85	67.959,86
19	Klabang	59.982,50	65.141,31	64.372,46	74.981,77	78.030,24	114.013,48	105.628,41
20	Botolinggo	42.738,76	54.236,52	68.815,13	65.760,45	66.058,03	98.451,53	106.946,41
21	Sempol	30.612,12	39.746,93	57.950,07	67.595,68	58.348,01	85.672,42	71.125,95
22	Prajejan	115.333,88	129.845,86	130.620,19	138.103,88	138.328,92	144.367,18	147.120,93
23	Cermee	120.314,26	121.870,26	138.142,99	145.593,11	157.766,81	194.257,62	217.642,75
JUMLAH		2.552.931,49	2.693.608,78	2.836.729,60	2.978.905,88	3.146.982,26	3.341.964,11	3.557.673,76

LAMPIRAN D. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT KECAMATAN ADHK TAHUN 2000 PERIODE TAHUN 2006-2012 (DALAM JUTA RUPIAH)

No.	Kecamatan	###	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan		5,18	7,32	3,87	13,39	-6,13	11,76
2	Grujugan		1,27	11,30	5,90	6,95	-1,29	-3,44
3	Tamanan		5,69	1,21	6,70	7,51	24,44	29,38
4	Jambesari DS		0,76	4,30	2,99	3,09	18,45	-12,93
5	Pujer		11,56	0,63	3,60	3,18	-9,43	9,17
6	Tlogosari		-1,89	18,57	4,55	7,05	-7,79	8,47
7	Sukosari		13,01	0,50	6,64	6,62	24,51	-2,85
8	Sbr. Wringin		9,96	3,76	4,29	3,95	1,90	6,60
9	Tapen		4,27	3,68	3,72	2,18	12,88	13,71
10	Wonosari		0,28	-1,15	4,12	6,97	10,10	0,09
11	Tenggarang		4,23	-11,42	4,35	-3,54	10,42	-10,27
12	Bondowoso		1,22	2,69	5,32	17,35	3,26	4,14
13	Curahdami		6,01	10,54	4,85	8,16	-6,76	15,77
14	Binakal		6,42	15,14	3,51	-6,73	-22,20	14,85
15	Pakem		5,58	0,38	5,77	0,29	-14,40	22,72
16	Wringin		4,87	2,52	3,51	4,61	-4,58	38,73
17	Tegalampel		7,32	12,75	3,42	3,12	-6,61	14,09
18	Taman Krocok		18,93	8,81	8,18	9,44	25,31	-19,86
19	Klabang		8,60	-1,18	16,48	4,07	46,11	-7,35
20	Botolinggo		26,90	26,88	-4,44	0,45	49,04	8,63
21	Sempol		29,84	45,80	16,64	-13,68	46,83	-16,98
22	Prajekan		12,58	0,60	5,73	0,16	4,37	1,91
23	Cermee		1,29	13,35	5,39	8,36	23,13	12,04
KABUPATEN BONDOWOSO			5,51	5,31	5,01	5,64	6,20	6,45

LAMPIRAN E. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN
KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE TAHUN
2006-2012 (JIWA)

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	44.255	44.541	42.934	40.566	45.824	43.802	46.507
2	Grujugan	33.607	33.900	32.677	34.299	34.381	35.850	34.798
3	Tamanan	31.897	32.176	31.014	32.522	35.621	34.561	35.938
4	Jambesari DS	35.245	35.553	34.269	33.246	33.723	34.705	35.130
5	Pujer	37.502	37.829	36.464	41.989	37.600	39.294	37.955
6	Tlogosari	44.980	45.373	43.735	41.530	44.033	43.179	44.325
7	Sukosari	15.969	16.208	15.623	14.613	14.987	14.680	14.995
8	Sbr. Wringin	31.839	32.117	30.958	29.920	32.945	32.020	33.291
9	Tapen	33.232	33.522	32.312	31.085	33.072	32.905	33.135
10	Wonosari	37.406	37.733	36.371	35.545	38.498	37.013	38.738
11	Tenggarang	37.732	38.062	36.688	35.716	39.874	39.565	40.337
12	Bondowoso	70.149	70.562	68.014	70.753	70.963	73.555	71.299
13	Curahdami	31.495	31.770	30.623	29.284	31.376	31.016	31.697
14	Binakal	17.337	17.089	16.857	15.611	15.173	16.173	15.142
15	Pakem	22.411	22.607	21.791	21.820	21.352	22.741	21.402
16	Wringin	39.071	39.412	37.989	37.865	39.423	39.487	40.043
17	Tegalampel	22.004	22.196	21.395	23.868	24.483	24.630	24.631
18	Taman Krocok	16.488	16.632	16.032	15.496	16.237	16.068	16.503
19	Klabang	20.117	20.293	19.560	18.796	18.413	19.523	18.564
20	Botolinggo	27.146	27.383	26.395	28.710	28.801	29.777	28.836
21	Sempol	11.034	11.130	10.729	10.872	11.252	11.311	11.458
22	Prajejan	24.445	24.858	23.961	25.337	25.116	25.780	25.191
23	Cermee	42.016	42.383	40.857	39.638	43.625	43.292	44.151
	JUMLAH	727.376	733.329	707.246	709.081	736.772	740.927	744.066

LAMPIRAN F. PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BONDOWOSO ADHK TAHUN 2000 PERIODE TAHUN 2006-2012 (RUPIAH)

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	3.684.434	3.850.561	4.287.303	4.712.860	4.730.749	4.645.615	4.889.861
2	Grujugan	4.397.365	4.414.516	5.097.201	5.142.519	5.486.938	5.194.419	5.167.331
3	Tamanan	3.141.665	3.291.574	3.456.099	3.516.668	3.451.789	4.427.114	5.508.253
4	Jambesari DS	2.419.846	2.417.075	2.615.377	2.776.557	2.821.938	3.247.966	2.793.683
5	Pujer	3.506.894	3.878.314	4.048.737	3.642.652	4.197.395	3.637.583	4.111.304
6	Tlogosari	2.897.965	2.818.670	3.467.220	3.817.323	3.854.153	3.624.213	3.829.467
7	Sukosari	3.654.746	4.069.163	4.242.695	4.837.288	5.028.615	6.392.129	6.079.661
8	Sbr. Wringin	3.009.759	3.281.031	3.531.761	3.811.181	3.597.895	3.772.002	3.867.591
9	Tapen	4.194.930	4.336.135	4.664.220	5.028.735	4.829.387	5.479.199	6.187.210
10	Wonosari	4.059.849	4.035.886	4.138.704	4.409.500	4.354.849	4.986.918	4.769.267
11	Tenggarang	4.613.521	4.766.975	4.380.774	4.695.586	4.056.839	4.514.741	3.973.646
12	Bondowoso	4.426.032	4.453.744	4.744.906	4.803.916	5.620.776	5.599.605	6.016.058
13	Curahdami	2.881.664	3.028.309	3.472.887	3.807.695	3.843.983	3.625.859	4.107.295
14	Binakal	3.788.313	4.090.008	4.774.011	5.336.187	5.120.745	3.737.804	4.585.291
15	Pakem	3.616.402	3.785.226	3.941.778	4.163.706	4.267.387	3.429.850	4.472.479
16	Wringin	3.626.744	3.770.310	4.010.273	4.164.800	4.184.535	3.986.205	5.453.346
17	Tegalampel	3.289.424	3.499.826	4.093.919	3.794.999	3.815.319	3.541.809	4.040.579
18	Taman Krocok	2.678.843	3.158.329	3.565.290	3.990.391	4.167.802	5.277.685	4.118.031
19	Klabang	2.981.682	3.210.089	3.291.004	3.989.301	4.237.780	5.839.957	5.689.960
20	Botolinggo	1.574.426	1.980.659	2.607.172	2.290.482	2.293.602	3.306.294	3.708.781
21	Sempol	2.774.457	3.571.039	5.401.476	6.217.150	5.185.568	7.574.257	6.207.536
22	Prajejan	4.718.055	5.223.405	5.451.343	5.450.722	5.507.602	5.599.968	5.840.218
23	Cermee	2.863.550	2.875.457	3.381.173	3.673.039	3.616.431	4.487.148	4.929.509
JUMLAH		3.426.112	3.643.752	4.028.927	4.264.055	4.272.699	4.510.517	4.781.395

LAMPIRAN G. KONTRIBUSI KECAMATAN TERHADAP PDRB KABUPATEN BONDOWOSO ADHK TAHUN 2000 PERIODE TAHUN 2006-2012 (%)

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	6,39	6,37	6,49	6,42	6,89	6,09	6,39
2	Grujugan	5,79	5,56	5,87	5,92	5,99	5,57	5,05
3	Tamanan	3,93	3,93	3,78	3,84	3,91	4,58	5,56
4	Jambesari DS	3,34	3,19	3,16	3,10	3,02	3,37	2,76
5	Pujer	5,15	5,45	5,20	5,13	5,02	4,28	4,39
6	Tlogosari	5,11	4,75	5,35	5,32	5,39	4,68	4,77
7	Sukosari	2,29	2,45	2,34	2,37	2,39	2,81	2,56
8	Sbr. Wringin	3,75	3,91	3,85	3,83	3,77	3,61	3,62
9	Tapen	5,46	5,40	5,31	5,25	5,08	5,39	5,76
10	Wonosari	5,95	5,65	5,31	5,26	5,33	5,52	5,19
11	Tenggarang	6,82	6,74	5,67	5,63	5,14	5,34	4,51
12	Bondowoso	12,16	11,67	11,38	11,41	12,67	12,32	12,06
13	Curahdami	3,56	3,57	3,75	3,74	3,83	3,37	3,66
14	Binakal	2,57	2,59	2,84	2,80	2,47	1,81	1,95
15	Pakem	3,17	3,18	3,03	3,05	2,90	2,33	2,69
16	Wringin	5,55	5,52	5,37	5,29	5,24	4,71	6,14
17	Tegalampel	2,84	2,88	3,09	3,04	2,97	2,61	2,80
18	Taman Krocok	1,73	1,95	2,01	2,08	2,15	2,54	1,91
19	Klabang	2,35	2,42	2,27	2,52	2,48	3,41	2,97
20	Botolinggo	1,67	2,01	2,43	2,21	2,10	2,95	3,01
21	Sempol	1,20	1,48	2,04	2,27	1,85	2,56	2,00
22	Prajejan	4,52	4,82	4,60	4,64	4,40	4,32	4,14
23	Cermee	4,71	4,52	4,87	4,89	5,01	5,81	6,12
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

LAMPIRAN H. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2006

No.	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	$\frac{(yi - Y)^2 * fi}{n}$
1	Maesan	163.055,86	44.541	3,66077	3,48129	0,17948	0,03221	1434,74356	0,00196
2	Grujugan	147.780,81	33.900	4,35925	3,48129	0,87796	0,77082	26131,20558	0,03563
3	Tamanan	100.208,81	32.176	3,11444	3,48129	-0,36685	0,13458	4330,14807	0,00590
4	Jambesari DS	85.286,89	35.553	2,39888	3,48129	-1,08241	1,17161	41654,00112	0,05680
5	Pujer	131.514,71	37.829	3,47651	3,48129	-0,00478	0,00002	0,86347	0,00000
6	Tlogosari	130.350,34	45.373	2,87287	3,48129	-0,60842	0,37017	16795,64123	0,02290
7	Sukosari	58.364,10	16.208	3,60084	3,48129	0,11955	0,01429	231,66872	0,00032
8	Sbr. Wringin	95.828,45	32.117	2,98373	3,48129	-0,49756	0,24757	7951,20998	0,01084
9	Tapen	139.406,05	33.522	4,15862	3,48129	0,67733	0,45877	15379,08487	0,02097
10	Wonosari	151.863,97	37.733	4,02474	3,48129	0,54345	0,29533	11143,70680	0,01520
11	Tenggarang	174.075,84	38.062	4,57354	3,48129	1,09225	1,19301	45407,84650	0,06192
12	Bondowoso	310.480,73	70.562	4,40014	3,48129	0,91885	0,84428	59573,82588	0,08124
13	Curahdami	90.759,18	31.770	2,85675	3,48129	-0,62454	0,39005	12391,75799	0,01690
14	Binakal	65.676,22	17.089	3,84328	3,48129	0,36199	0,13104	2239,27668	0,00305
15	Pakem	81.046,97	22.607	3,58508	3,48129	0,10379	0,01077	243,54950	0,00033
16	Wringin	141.700,90	39.412	3,59536	3,48129	0,11407	0,01301	512,79896	0,00070
17	Tegalampel	72.382,11	22.196	3,26102	3,48129	-0,22027	0,04852	1076,93111	0,00147
18	Taman Krocok	44.168,02	16.632	2,65561	3,48129	-0,82568	0,68175	11338,91479	0,01546
19	Klabang	59.982,50	20.293	2,95587	3,48129	-0,52542	0,27607	5602,14197	0,00764
20	Botolinggo	42.738,76	27.383	1,56077	3,48129	-1,92052	3,68838	100999,23233	0,13773
21	Sempol	30.612,12	11.130	2,75033	3,48129	-0,73096	0,53431	5947,01816	0,00811
22	Prajejan	115.333,88	24.858	4,63962	3,48129	1,15833	1,34173	33353,37048	0,04548
23	Cermee	120.314,26	42.383	2,83874	3,48129	-0,64255	0,41286	17498,41123	0,02386
JUMLAH		2.552.931,49	733.329	3,48129					0,57442
								IW	0,75790

LAMPIRAN I. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2007

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	(yi -Y)2*fi/n
1	Maesan	171.509,65	44.541	3,85056	3,67312	0,17744	0,03148	1402,34888	0,00191
2	Grujugan	149.654,22	33.900	4,41452	3,67312	0,74139	0,54966	18633,83530	0,02541
3	Tamanan	105.908,18	32.176	3,29157	3,67312	-0,38155	0,14558	4684,13235	0,00639
4	Jambesari DS	85.933,75	35.553	2,41707	3,67312	-1,25605	1,57766	56090,16288	0,07649
5	Pujer	146.714,65	37.829	3,87831	3,67312	0,20519	0,04210	1592,73059	0,00217
6	Tlogosari	127.890,97	45.373	2,81867	3,67312	-0,85445	0,73009	33126,24256	0,04517
7	Sukosari	65.954,84	16.208	4,06916	3,67312	0,39604	0,15685	2542,25448	0,00347
8	Sbr. Wringin	105.377,01	32.117	3,28103	3,67312	-0,39209	0,15374	4937,56585	0,00673
9	Tapen	145.356,83	33.522	4,33614	3,67312	0,66301	0,43958	14735,83688	0,02009
10	Wonosari	152.284,72	37.733	4,03589	3,67312	0,36276	0,13160	4965,49673	0,00677
11	Tenggarang	181.438,25	38.062	4,76698	3,67312	1,09385	1,19651	45541,02348	0,06210
12	Bondowoso	314.263,26	70.562	4,45374	3,67312	0,78062	0,60937	42997,95210	0,05863
13	Curahdami	96.209,49	31.770	3,02831	3,67312	-0,64481	0,41579	13209,53865	0,01801
14	Binakal	69.892,40	17.089	4,09001	3,67312	0,41688	0,17379	2969,87216	0,00405
15	Pakem	85.571,50	22.607	3,78523	3,67312	0,11210	0,01257	284,09471	0,00039
16	Wringin	148.596,20	39.412	3,77031	3,67312	0,09719	0,00945	372,25551	0,00051
17	Tegalampel	77.682,68	22.196	3,49983	3,67312	-0,17330	0,03003	666,59993	0,00091
18	Taman Krocok	52.529,30	16.632	3,15833	3,67312	-0,51479	0,26501	4407,69621	0,00601
19	Klabang	65.141,31	20.293	3,21009	3,67312	-0,46303	0,21440	4350,76683	0,00593
20	Botolinggo	54.236,52	27.383	1,98066	3,67312	-1,69246	2,86444	78437,02271	0,10696
21	Sempol	39.746,93	11.130	3,57104	3,67312	-0,10208	0,01042	115,99317	0,00016
22	Prajekan	129.845,86	24.858	5,22341	3,67312	1,55028	2,40337	59744,17106	0,08147
23	Cermee	121.870,26	42.383	2,87546	3,67312	-0,79767	0,63627	26967,03638	0,03677
JUMLAH		2.693.608,78	733.329	3,67312					0,57651
								IW	0,75929

LAMPIRAN J. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	(yi -Y)2*fi/n
1	Maesan	184.069,18	42.934	4,28730	3,67312	0,61418	0,37722	16195,22823	0,02290
2	Grujugan	166.559,71	32.677	5,09720	4,01095	1,08625	1,17993	38556,29598	0,05452
3	Tamanan	107.187,57	31.014	3,45610	4,01095	-0,55486	0,30786	9548,12416	0,01350
4	Jambesari DS	89.627,29	34.269	2,61538	4,01095	-1,39558	1,94763	66744,17824	0,09437
5	Pujer	147.632,68	36.464	4,04874	4,01095	0,03778	0,00143	52,05297	0,00007
6	Tlogosari	151.638,45	43.735	3,46722	4,01095	-0,54373	0,29565	12930,06124	0,01828
7	Sukosari	66.285,05	15.623	4,24270	4,01095	0,23174	0,05370	839,03383	0,00119
8	Sbr. Wringin	109.334,99	30.958	3,53176	4,01095	-0,47919	0,22963	7108,67419	0,01005
9	Tapen	150.710,67	32.312	4,66422	4,01095	0,65327	0,42676	13789,37467	0,01950
10	Wonosari	150.526,90	36.371	4,13870	4,01095	0,12775	0,01632	593,56815	0,00084
11	Tenggarang	160.719,72	36.688	4,38077	4,01095	0,36982	0,13677	5017,63796	0,00709
12	Bondowoso	322.721,83	68.014	4,74491	4,01095	0,73395	0,53869	36638,33431	0,05180
13	Curahdami	106.350,78	30.623	3,47289	4,01095	-0,53807	0,28952	8865,90361	0,01254
14	Binakal	80.475,91	16.857	4,77401	4,01095	0,76306	0,58226	9815,14277	0,01388
15	Pakem	85.893,80	21.791	3,94178	4,01095	-0,06918	0,00479	104,27508	0,00015
16	Wringin	152.348,02	37.989	4,01027	4,01095	-0,00068	0,00000	0,01765	0,00000
17	Tegalampel	87.588,97	21.395	4,09392	4,01095	0,08296	0,00688	147,26494	0,00021
18	Taman Krocok	57.157,25	16.032	3,56529	4,01095	-0,44566	0,19862	3184,13926	0,00450
19	Klabang	64.372,46	19.560	3,29100	4,01095	-0,71995	0,51833	10138,57628	0,01434
20	Botolinggo	68.815,13	26.395	2,60717	4,01095	-1,40378	1,97061	52013,24159	0,07354
21	Sempol	57.950,07	10.729	5,40148	4,01095	1,39052	1,93355	20744,21346	0,02933
22	Prajejan	130.620,19	23.961	5,45134	4,01095	1,44039	2,07472	49712,59784	0,07029
23	Cermee	138.142,99	40.857	3,38117	4,01095	-0,62978	0,39662	16204,71912	0,02291
JUMLAH		2.836.729,60	707.246	4,01095					0,53580
								IW	0,73198

LAMPIRAN K. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi - Y) ²	(yi - Y) ² *fi	$\frac{(yi - Y)^2 * fi}{n}$
1	Maesan	191.184,11	40.566	4,71286	4,20108	0,51178	0,26192	10625,12351	0,01498
2	Grujugan	176.384,93	34.299	5,14252	4,20108	0,94144	0,88631	30399,73244	0,04287
3	Tamanan	114.367,54	32.522	3,51667	4,20108	-0,68441	0,46842	15233,74759	0,02148
4	Jambesari DS	92.308,59	33.246	2,77656	4,20108	-1,42452	2,02927	67464,36322	0,09514
5	Pujer	152.950,85	41.989	3,64265	4,20108	-0,55843	0,31184	13093,88911	0,01847
6	Tlogosari	158.533,65	41.530	3,81732	4,20108	-0,38376	0,14727	6116,11597	0,00863
7	Sukosari	70.686,41	14.613	4,83729	4,20108	0,63621	0,40476	5914,70219	0,00834
8	Sbr. Wringin	114.030,83	29.920	3,81118	4,20108	-0,38990	0,15202	4548,48149	0,00641
9	Tapen	156.317,27	31.085	5,02873	4,20108	0,82765	0,68501	21293,48685	0,03003
10	Wonosari	156.733,54	35.545	4,40950	4,20108	0,20842	0,04344	1544,01704	0,00218
11	Tenggarang	167.707,40	35.716	4,69559	4,20108	0,49451	0,24454	8733,84917	0,01232
12	Bondowoso	339.890,66	70.753	4,80392	4,20108	0,60284	0,36341	25712,38087	0,03626
13	Curahdami	111.504,79	29.284	3,80770	4,20108	-0,39338	0,15475	4531,75602	0,00639
14	Binakal	83.302,63	15.611	5,33619	4,20108	1,13511	1,28847	20114,12385	0,02837
15	Pakem	90.850,47	21.820	4,16371	4,20108	-0,03737	0,00140	30,47809	0,00004
16	Wringin	157.701,66	37.865	4,16480	4,20108	-0,03628	0,00132	49,84086	0,00007
17	Tegalampel	90.580,71	23.868	3,79500	4,20108	-0,40608	0,16490	3935,94436	0,00555
18	Taman Krocok	61.834,92	15.496	3,99039	4,20108	-0,21069	0,04439	687,86032	0,00097
19	Klabang	74.981,77	18.796	3,98930	4,20108	-0,21178	0,04485	842,99009	0,00119
20	Botolinggo	65.760,45	28.710	2,29048	4,20108	-1,91060	3,65039	104803,74200	0,14780
21	Sempol	67.595,68	10.872	6,21715	4,20108	2,01607	4,06454	44191,52055	0,06232
22	Prajekan	138.103,88	25.337	5,45072	4,20108	1,24964	1,56160	39566,06375	0,05580
23	Cermee	145.593,11	39.638	3,67304	4,20108	-0,52804	0,27883	11052,25658	0,01559
JUMLAH		2.978.905,88	709.081	4,20108					0,62121
								IW	0,78817

LAMPIRAN L. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	(yi -Y)2*fi/n
1	Maesan	216.781,85	45.824	4,73075	4,27131	0,45944	0,21108	9672,68858	0,01313
2	Grujugan	188.646,41	34.381	5,48694	4,27131	1,21563	1,47775	50806,49269	0,06896
3	Tamanan	122.956,17	35.621	3,45179	4,27131	-0,81952	0,67162	23923,64733	0,03247
4	Jambesari DS	95.164,20	33.723	2,82194	4,27131	-1,44937	2,10068	70841,32873	0,09615
5	Pujer	157.822,06	37.600	4,19740	4,27131	-0,07392	0,00546	205,42813	0,00028
6	Tlogosari	169.709,90	44.033	3,85415	4,27131	-0,41716	0,17402	7662,66675	0,01040
7	Sukosari	75.363,86	14.987	5,02862	4,27131	0,75730	0,57351	8595,19488	0,01167
8	Sbr. Wringin	118.532,65	32.945	3,59789	4,27131	-0,67342	0,45349	14940,19713	0,02028
9	Tapen	159.717,49	33.072	4,82939	4,27131	0,55808	0,31145	10300,24781	0,01398
10	Wonosari	167.652,99	38.498	4,35485	4,27131	0,08354	0,00698	268,66502	0,00036
11	Tenggarang	161.762,40	39.874	4,05684	4,27131	-0,21447	0,04600	1834,12928	0,00249
12	Bondowoso	398.867,14	70.963	5,62078	4,27131	1,34947	1,82106	129227,64976	0,17540
13	Curahdami	120.608,82	31.376	3,84398	4,27131	-0,42733	0,18261	5729,53564	0,00778
14	Binakal	77.697,07	15.173	5,12075	4,27131	0,84943	0,72154	10947,91137	0,01486
15	Pakem	91.117,24	21.352	4,26739	4,27131	-0,00392	0,00002	0,32883	0,00000
16	Wringin	164.966,93	39.423	4,18454	4,27131	-0,08678	0,00753	296,85683	0,00040
17	Tegalampel	93.410,45	24.483	3,81532	4,27131	-0,45599	0,20793	5090,72042	0,00691
18	Taman Krocok	67.672,60	16.237	4,16780	4,27131	-0,10351	0,01071	173,96425	0,00024
19	Klabang	78.030,24	18.413	4,23778	4,27131	-0,03353	0,00112	20,70231	0,00003
20	Botolinggo	66.058,03	28.801	2,29360	4,27131	-1,97771	3,91133	112650,28966	0,15290
21	Sempol	58.348,01	11.252	5,18557	4,27131	0,91426	0,83587	9405,16306	0,01277
22	Prajekan	138.328,92	25.116	5,50760	4,27131	1,23629	1,52841	38387,67017	0,05210
23	Cermee	157.766,81	43.625	3,61643	4,27131	-0,65488	0,42887	18709,33635	0,02539
JUMLAH		3.146.982,26	736.772	4,27131					0,71893
								IW	0,84790

LAMPIRAN M. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	(yi -Y)2*fi/n
1	Maesan	203.487,23	43.802	4,64562	4,51052	0,13510	0,01825	799,44687	0,00108
2	Grujugan	186.219,92	35.850	5,19442	4,51052	0,68390	0,46772	16767,81160	0,02263
3	Tamanan	153.005,47	34.561	4,42711	4,51052	-0,08340	0,00696	240,41342	0,00032
4	Jambesari DS	112.720,66	34.705	3,24797	4,51052	-1,26255	1,59404	55321,01891	0,07466
5	Pujer	142.935,18	39.294	3,63758	4,51052	-0,87293	0,76201	29942,60618	0,04041
6	Tlogosari	156.489,88	43.179	3,62421	4,51052	-0,88630	0,78554	33918,65855	0,04578
7	Sukosari	93.836,46	14.680	6,39213	4,51052	1,88161	3,54046	51974,01009	0,07015
8	Sbr. Wringin	120.779,49	32.020	3,77200	4,51052	-0,73852	0,54541	17463,88771	0,02357
9	Tapen	180.293,03	32.905	5,47920	4,51052	0,96868	0,93834	30876,18668	0,04167
10	Wonosari	184.580,79	37.013	4,98692	4,51052	0,47640	0,22696	8400,37421	0,01134
11	Tenggarang	178.625,73	39.565	4,51474	4,51052	0,00422	0,00002	0,70582	0,00000
12	Bondowoso	411.878,92	73.555	5,59960	4,51052	1,08909	1,18611	87244,40072	0,11775
13	Curahdami	112.459,64	31.016	3,62586	4,51052	-0,88466	0,78262	24273,76065	0,03276
14	Binakal	60.451,50	16.173	3,73780	4,51052	-0,77271	0,59709	9656,67765	0,01303
15	Pakem	77.998,21	22.741	3,42985	4,51052	-1,08067	1,16784	26557,91368	0,03584
16	Wringin	157.403,27	39.487	3,98620	4,51052	-0,52431	0,27490	10855,12051	0,01465
17	Tegalampel	87.234,75	24.630	3,54181	4,51052	-0,96871	0,93840	23112,70258	0,03119
18	Taman Krocok	84.801,85	16.068	5,27769	4,51052	0,76717	0,58855	9456,77107	0,01276
19	Klabang	114.013,48	19.523	5,83996	4,51052	1,32944	1,76741	34505,13833	0,04657
20	Botolinggo	98.451,53	29.777	3,30629	4,51052	-1,20422	1,45015	43181,20140	0,05828
21	Sempol	85.672,42	11.311	7,57426	4,51052	3,06374	9,38650	106170,70109	0,14329
22	Prajeakan	144.367,18	25.780	5,59997	4,51052	1,08945	1,18690	30598,36127	0,04130
23	Cermee	194.257,62	43.292	4,48715	4,51052	-0,02337	0,00055	23,64256	0,00003
JUMLAH		3.341.964,11	740.927	4,51052					0,87909
								IW	0,93760

LAMPIRAN N. INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012

No	Kecamatan	PDRB	Penduduk	yi	Y	yi-Y	(yi -Y)2	(yi -Y)2*fi	(yi -Y)2*fi/n
1	Maesan	227.412,75	46.507	4,88986	4,78140	0,10847	0,01176	547,14141	0,00074
2	Grujugan	179.812,77	34.798	5,16733	4,78140	0,38594	0,14895	5183,02162	0,00697
3	Tamanan	197.955,61	35.938	5,50825	4,78140	0,72686	0,52832	18986,85415	0,02552
4	Jambesari DS	98.142,08	35.130	2,79368	4,78140	-1,98771	3,95100	138798,66756	0,18654
5	Pujer	156.044,54	37.955	4,11130	4,78140	-0,67009	0,44902	17042,65355	0,02290
6	Tlogosari	169.741,11	44.325	3,82947	4,78140	-0,95193	0,90617	40165,91166	0,05398
7	Sukosari	91.164,52	14.995	6,07966	4,78140	1,29827	1,68549	25273,98410	0,03397
8	Sbr. Wringin	128.755,97	33.291	3,86759	4,78140	-0,91380	0,83504	27799,27055	0,03736
9	Tapen	205.013,19	33.135	6,18721	4,78140	1,40581	1,97631	65485,14841	0,08801
10	Wonosari	184.751,87	38.738	4,76927	4,78140	-0,01213	0,00015	5,69818	0,00001
11	Tenggarang	160.284,95	40.337	3,97365	4,78140	-0,80775	0,65246	26318,25740	0,03537
12	Bondowoso	428.938,89	71.299	6,01606	4,78140	1,23466	1,52439	108687,53148	0,14607
13	Curahdami	130.188,92	31.697	4,10729	4,78140	-0,67410	0,45441	14403,49009	0,01936
14	Binakal	69.430,48	15.142	4,58529	4,78140	-0,19610	0,03846	582,31356	0,00078
15	Pakem	95.719,99	21.402	4,47248	4,78140	-0,30892	0,09543	2042,38240	0,00274
16	Wringin	218.368,32	40.043	5,45335	4,78140	0,67195	0,45152	18080,10021	0,02430
17	Tegalampel	99.523,49	24.631	4,04058	4,78140	-0,74082	0,54881	13517,73028	0,01817
18	Taman Krocok	67.959,86	16.503	4,11803	4,78140	-0,66336	0,44005	7262,19128	0,00976
19	Klabang	105.628,41	18.564	5,68996	4,78140	0,90856	0,82549	15324,37555	0,02060
20	Botolinggo	106.946,41	28.836	3,70878	4,78140	-1,07261	1,15050	33175,86414	0,04459
21	Sempol	71.125,95	11.458	6,20754	4,78140	1,42614	2,03388	23304,16950	0,03132
22	Prajekan	147.120,93	25.191	5,84022	4,78140	1,05882	1,12111	28241,75936	0,03796
23	Cermee	217.642,75	44.151	4,92951	4,78140	0,14811	0,02194	968,56795	0,00130
JUMLAH		3.557.673,76	744.066	4,78140					0,84831
								IW	0,92104

LAMPIRAN O. INDEKS WILLIAMSON PER KECAMATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	0,00898	0,00842	0,01200	0,02060	0,01897	0,00515	0,00401
2	Grujugan	0,03834	0,03069	0,04116	0,03485	0,04347	0,02358	0,01234
3	Tamanan	0,01561	0,01539	0,02048	0,02467	0,02983	0,00282	0,02362
4	Jambesari DS	0,04841	0,05324	0,05416	0,05192	0,05133	0,04284	0,06387
5	Pujer	0,00022	0,00897	0,00151	0,02287	0,00276	0,03151	0,02238
6	Tlogosari	0,03074	0,04092	0,02384	0,01563	0,01688	0,03354	0,03436
7	Sukosari	0,00361	0,01133	0,00607	0,01537	0,01788	0,04152	0,02726
8	Sbr. Wringin	0,02115	0,01580	0,01767	0,01348	0,02357	0,02407	0,02859
9	Tapen	0,02941	0,02729	0,02462	0,02917	0,01957	0,03200	0,04387
10	Wonosari	0,02504	0,01584	0,00511	0,00785	0,00316	0,01669	0,00041
11	Tenggarang	0,05054	0,04797	0,01485	0,01868	0,00826	0,00015	0,02781
12	Bondowoso	0,05789	0,04661	0,04013	0,03205	0,06933	0,05379	0,05652
13	Curahdami	0,02640	0,02584	0,01974	0,01346	0,01460	0,02838	0,02058
14	Binakal	0,01122	0,01225	0,02077	0,02835	0,02018	0,01790	0,00414
15	Pakem	0,00370	0,00379	0,00214	0,00110	0,00011	0,02968	0,00775
16	Wringin	0,00537	0,00434	0,00003	0,00141	0,00332	0,01898	0,02305
17	Tegalampel	0,00778	0,00580	0,00254	0,01254	0,01376	0,02769	0,01993
18	Taman Krocok	0,02526	0,01492	0,01183	0,00524	0,00254	0,01771	0,01461
19	Klabang	0,01775	0,01483	0,02111	0,00580	0,00088	0,03383	0,02122
20	Botolinggo	0,07538	0,06296	0,04781	0,06471	0,06473	0,03785	0,03123
21	Sempol	0,01829	0,00242	0,03019	0,04202	0,01870	0,05934	0,02617
22	Prajejan	0,04332	0,05495	0,04674	0,03976	0,03779	0,03186	0,02881
23	Cermee	0,03138	0,03692	0,02669	0,02101	0,02638	0,00089	0,00534

LAMPIRAN P. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2006-2012

No	Kecamatan	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Maesan	58,92	59,31	59,80	63,00	64,50	63,46	64,62
2.	Grujugan	64,23	64,66	65,19	65,25	65,50	67,49	68,73
3.	Tamanan	60,27	60,67	61,17	63,60	64,80	64,05	65,22
4.	Jambesari DS	57,26	57,64	58,11	60,14	61,37	61,93	63,07
5.	Pujer	62,71	63,13	63,65	63,85	64,45	65,79	67,00
6.	Tlogosari	54,91	55,28	55,73	58,12	59,05	59,87	60,97
7.	Sukosari	54,89	55,26	55,71	56,02	56,80	59,77	60,87
8.	Sbr. Wringin	52,45	52,80	53,23	55,85	56,82	57,82	58,88
9.	Tapen	55,37	55,74	56,20	56,60	57,23	60,47	61,58
10.	Wonosari	57,19	57,57	58,04	58,30	58,56	61,92	63,06
11.	Tenggarang	60,05	60,45	60,95	61,25	61,55	63,99	65,16
12.	Bondowoso	67,57	68,02	68,58	68,98	69,38	70,25	71,54
13.	Curahdami	60,85	61,26	61,76	63,26	64,26	64,43	65,61
14.	Binakal	52,68	53,03	53,47	57,25	59,03	57,83	58,89
15.	Pakem	55,54	55,91	56,37	58,29	59,22	60,66	61,77
16.	Wringin	54,78	55,15	55,60	56,02	56,62	59,70	60,79
17.	Tegalampel	52,92	53,27	53,71	56,21	57,16	57,84	58,90
18.	Taman Krocok	53,61	53,97	54,41	57,62	58,38	58,54	59,61
19.	Klabang	60,67	61,07	61,57	63,05	63,82	64,30	65,48
20.	Botolinggo	63,01	63,43	63,95	65,15	65,79	57,93	58,99
21.	Sempol	53,32	53,68	54,12	57,72	58,73	66,48	67,70
22.	Prajekan	57,94	58,32	58,80	60,03	60,85	62,16	63,30
23.	Cermee	62,76	63,18	63,70	65,12	65,80	66,01	67,22
KAB. BONDOWOSO		60,36	60,76	61,26	62,11	62,79	63,81	64,98

LAMPIRAN Q. ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN

No.	Kecamatan	PE		Y Kap		Y Kap		Keterangan Tipologi Kec.	
		2008	2012	2008	2012	2008	2012	2008	2012
1	Maesan	11,34	< 5,26	< 4.287.303	>	4.889.861	>	Sedang Tumbuh	Sedang Tumbuh
2	Grujugan	15,46	> -0,52	< 5.097.201	>	5.167.331	>	Maju & Tumb Cepat	Sedang Tumbuh
3	Tamanan	5,00	< 24,42	> 3.456.099	<	5.508.253	>	Relatif Tertinggal	Maju & Tumb Cepat
4	Jambesari DS	8,20	< -13,99	< 2.615.377	<	2.793.683	<	Relatif Tertinggal	Relatif Tertinggal
5	Pujer	4,39	< 13,02	> 4.048.737	>	4.111.304	<	Sedang Tumbuh	Maju Tapi Tertekan
6	Tlogosari	23,01	> 5,66	< 3.467.220	<	3.829.467	<	Maju Tapi Tertekan	Relatif Tertinggal
7	Sukosari	4,26	< -4,89	< 4.242.695	>	6.079.661	>	Sedang Tumbuh	Sedang Tumbuh
8	Sbr. Wringin	7,64	< 2,53	< 3.531.761	<	3.867.591	<	Relatif Tertinggal	Relatif Tertinggal
9	Tapen	7,57	< 12,92	> 4.664.220	>	6.187.210	>	Sedang Tumbuh	Maju & Tumb Cepat
10	Wonosari	2,55	< -4,36	< 4.138.704	>	4.769.267	<	Sedang Tumbuh	Relatif Tertinggal
11	Tenggarang	-8,10	< -11,99	< 4.380.774	>	3.973.646	<	Sedang Tumbuh	Relatif Tertinggal
12	Bondowoso	6,54	< 7,44	> 4.744.906	>	6.016.058	>	Sedang Tumbuh	Maju Tapi Tertekan
13	Curahdami	14,68	> 13,28	> 3.472.887	<	4.107.295	<	Maju Tapi Tertekan	Maju Tapi Tertekan
14	Binakal	16,72	> 22,67	> 4.774.011	>	4.585.291	<	Maju & Tumb Cepat	Maju Tapi Tertekan
15	Pakem	4,14	< 30,40	> 3.941.778	<	4.472.479	<	Relatif Tertinggal	Maju Tapi Tertekan
16	Wringin	6,36	< 36,81	> 4.010.273	<	5.453.346	>	Relatif Tertinggal	Maju & Tumb Cepat
17	Tegalampel	16,97	> 14,08	> 4.093.919	>	4.040.579	<	Maju & Tumb Cepat	Maju Tapi Tertekan
18	Taman Krocok	12,89	> -21,97	< 3.565.290	<	4.118.031	<	Maju Tapi Tertekan	Relatif Tertinggal
19	Klabang	2,52	< -2,57	< 3.291.004	<	5.689.960	>	Sedang Tumbuh	Sedang Tumbuh
20	Botolinggo	31,63	> 12,17	> 2.607.172	<	3.708.781	<	Maju Tapi Tertekan	Maju Tapi Tertekan
21	Sempol	51,26	> -18,04	< 5.401.476	>	6.207.536	>	Maju & Tumb Cepat	Sedang Tumbuh
22	Prajejan	4,36	< 4,29	< 5.451.343	>	5.840.218	>	Sedang Tumbuh	Sedang Tumbuh
23	Cermee	17,59	> 9,86	> 3.381.173	<	4.929.509	>	Maju Tapi Tertekan	Maju & Tumb Cepat
KABUPATEN BONDOWOSO		11,61		5,93		4.028.927		4.781.395	

LAMPIRAN R. INDEKS KETIMPANGAN PENDAPATAN RELATIF BONET

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Maesan	0,075398	0,056757	0,064130	0,105253	0,107204	0,029952	0,022685
2	Grujugan	0,283486	0,211530	0,265151	0,206016	0,284185	0,151624	0,080716
3	Tamanan	0,083023	0,096653	0,142179	0,175276	0,192129	0,018491	0,152018
4	Jambesari DS	0,293705	0,336652	0,350850	0,348846	0,339542	0,279913	0,415718
5	Pujer	0,023578	0,064374	0,004917	-0,145730	-0,017624	-0,193533	-0,140146
6	Tlogosari	-0,154153	-0,226437	-0,139418	-0,104767	-0,097958	-0,196497	-0,199090
7	Sukosari	0,066733	0,116751	0,053058	0,134434	0,176918	0,417161	0,271524
8	Sbr. Wringin	-0,121523	-0,099546	-0,123399	-0,106207	-0,157934	-0,163732	-0,191117
9	Tapen	0,224400	0,190019	0,157683	0,179332	0,130290	0,214761	0,294018
10	Wonosari	0,184973	0,107618	0,027247	0,034110	0,019227	0,105620	-0,002537
11	Tenggarang	0,346576	0,308260	0,087330	0,101202	-0,050521	0,000936	-0,168936
12	Bondowoso	0,291853	0,222296	0,177710	0,126608	0,315510	0,241455	0,258222
13	Curahdami	-0,158911	-0,168904	-0,138012	-0,107025	-0,100338	-0,196132	-0,140984
14	Binakal	0,105718	0,122472	0,184934	0,251435	0,198480	-0,171314	-0,041014
15	Pakem	0,055541	0,038826	-0,021631	-0,023534	-0,001243	-0,239588	-0,064608
16	Wringin	0,058560	0,034733	-0,004630	-0,023277	-0,020634	-0,116242	0,140534
17	Tegalampel	-0,039896	-0,039500	0,016131	-0,110002	-0,107047	-0,214767	-0,154937
18	Taman Krocok	-0,218110	-0,133221	-0,115077	-0,064179	-0,024551	0,170084	-0,138739
19	Klabang	-0,129718	-0,119015	-0,183156	-0,064435	-0,008173	0,294742	0,190021
20	Botolinggo	-0,540463	-0,456423	-0,352887	-0,462840	-0,463196	-0,266981	-0,224331
21	Sempol	-0,190202	-0,019956	0,340673	0,458037	0,213652	0,679243	0,298269
22	Prajekan	0,377087	0,433524	0,353051	0,278295	0,289022	0,241536	0,221446
23	Cermee	-0,164198	-0,210853	-0,160776	-0,138604	-0,153596	-0,005181	0,030977

LAMPIRAN S. ANALISIS SHIFT-SHARE SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2012 (JUTA RP) 2006-2012 (MILYAR RP)

Sektor	NG	MI	RS	Dij
Pertanian	206,27	-336,18	162,02	32,11
Pertambangan	10,58	1,74	-4,49	7,83
Industri Pengolahan	143,50	-43,34	25,89	126,05
Listrik dan Air Bersih	2,42	-5,60	3,93	0,75
Bangunan	12,55	-0,87	2,54	14,22
Perdag, Hotel & res	324,49	68,02	-12,54	379,96
Pengangkutan & Komk	37,51	20,17	-20,86	36,82
Jasa Bank, Keu & pers	37,13	9,29	-9,38	37,03
Jasa-Jasa lainnya	108,17	17,25	-24,98	100,44
Jumlah	882,63	-269,53	122,13	735,22

LAMPIRAN T. ANALISIS *SHIFT-SHARE* SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PER KECAMATAN TERHADAP
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2006-2012 (JUTA)

No.	KECAMATAN	NG	MI	RS	Dij
1.	Maesan	64.634,27	460,69	-277,38	64,82
2.	Grujugan	58.328,57	166,76	-26.296,61	32,20
3.	Tamanan	41.487,66	2.048,67	56.259,14	99,80
4.	Jambesari DS	32.170,87	-1.395,33	-19.315,68	11,46
5.	Pujer	52.848,91	1.088,92	-28.319,08	25,62
6.	Tlogosari	50.636,12	-665,61	-11.245,35	38,73
7.	Sukosari	20.113,39	-2.856,86	12.687,03	29,94
8.	Sbr. Wringin	35.794,84	-1.920,18	-2.867,32	31,01
9.	Tapen	54.420,62	-445,15	11.186,52	65,16
10.	Wonosari	60.992,77	1.223,96	-28.104,87	34,11
11.	Tenggarang	75.145,20	6.634,51	-88.936,10	-7,16
12.	Bondowoso	135.738,38	13.543,07	-17.280,22	132,00
13.	Curahdami	35.777,46	57,54	3.652,28	39,49
14.	Binakal	24.497,40	-1.350,67	-20.743,14	2,40
15.	Pakem	30.531,11	-1.366,39	-15.858,09	13,31
16.	Wringin	52.973,08	-2.795,87	23.694,34	73,87
17.	Tegalampel	27.309,44	-1.177,85	-168,06	25,96
18.	Taman Krocok	16.321,49	-1.061,63	7.470,35	22,73
19.	Klabang	23.101,77	-505,43	22.544,14	45,14
20.	Botolinggo	15.859,64	-960,98	48.348,01	63,25
21.	Sempol	11.207,79	-840,16	29.306,04	39,67
22.	Prajejan	43.211,06	-2.180,68	-11.424,01	29,61
23.	Cermee	41.650,52	-5.701,33	55.677,97	91,63